



# LAPORAN KINERJA KAB. BOJONEGORO INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023



**BAPPEDA KABUPATEN  
NGANJUK**

**Jl. Jend. Basuki Rakhmad No. 1, Telp. (0358) 321233**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya dapat tersusun Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Nganjuk atas kegiatan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam satu Tahun Anggaran 2023. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Bappeda Kabupaten Nganjuk sebagai bagian dari Instansi Pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja yang berisi hasil analisis pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 merupakan penyusunan LKjIP Bappeda Kabupaten Nganjuk tahun ketiga untuk pencapaian sasaran strategis pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023.

Tujuan disusunnya pelaporan Kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Semoga penyajian LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 menjadi umpan balik untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja kedepan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek pemahaman, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun kondisi pelaksanaannya.

Nganjuk, Januari 2024

KERALA BAPPEDA  
KABUPATEN NGANJUK



**Dr. FADJAR AUDIONO, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19640311 199303 1 001





## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan .....  | 6  |
| Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023 .....  | 7  |
| Tabel 2.3 Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2023 .....  | 8  |
| Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....   | 11 |
| Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....   | 12 |
| Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023 .....   | 12 |
| Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023 .....  | 13 |
| Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir periode RENSTRA .....  | 13 |
| Tabel 3.5 Muatan RPJMD Dengan RKPD .....  | 15 |
| Tabel 3.6 Muatan RPJMD Dengan RKPD .....  | 15 |
| Tabel 3.7 Muatan Antara Renja SKPD Dengan RKPD .....  | 15 |
| Tabel 3.8 Muatan Antara Renja SKPD Dengan RKPD .....  | 16 |
| Tabel 3.9 Capaian Sasaran Misi Pemerintahan .....   | 19 |
| Tabel 3.10 Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW .....   | 18 |
| Tabel 3.11 Capaian Kinerja sasaran I .....  | 18 |
| Tabel : 3.12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....   | 21 |
| Tabel : 3.13 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023,<br>Evaluasi dan Rekomendasi Bappeda Kabupaten Nganjuk ..... | 22 |
| Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....  | 33 |
| Tabel : 3.15 Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan Tahun 2023 .....  | 23 |
| Tabel : 3.16 Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2023 .....   | 34 |



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Permasalahan utama yang sedang dihadapi sesuai dengan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 antara lain : masih rendahnya produk perencanaan yang implementatif; belum optimalnya pemanfaatan teknologi data dan informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah; menurunnya partisipasi masyarakat di berbagai forum yang diselenggarakan; tuntutan terhadap kualitas dan profesionalisme SDM perencana; lemahnya pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme dalam konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) melalui aplikasi yang berbasis web; pelaksanaan asisitensi terhadap seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah agar tercipta Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi lebih baik; penyusunan dokumen hasil penelitian dan pengembangan untuk dimanfaatkan pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Bappeda Kabupaten Nganjuk pada tahun-tahun mendatang, maka perlu dilakukan beberapa langkah strategis, antara lain : Meningkatkan koordinasi dengan fokus pada kesetaraan, kebersamaan antar bidang, antar SKPD; Meningkatkan kualitas perencanaan agar akuntabilitas kinerja dapat terwujud dengan menerapkan sistem perencanaan yang terintegrasi berbasis web; Meningkatkan volume monitoring yang diatur secara berkala untuk dijadikan bahan evaluasi.

# **Bab I**

## **Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang / Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nganjuk**

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Petunjuk teknis ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada tingkat Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik agar terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Institusi Bappeda Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu organisasi pemerintahan yang membantu Kepala Daerah menjalankan tugas dan fungsi unsur penunjang urusan pemerintah di bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan menyusun LKjIP Tahun 2022 sebagai Laporan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022. Dengan adanya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022, dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas, serta sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja internal Bappeda untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Nganjuk di tahun selanjutnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, badan sebagaimana Pasal 209 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutnya secara operasional kewenangan suatu Badan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 bahwa Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk adalah salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Nganjuk dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk



Nomor 08 Tahun 2016, sedangkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022. Sesuai dengan kewenangannya Bappeda Kabupaten Nganjuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan.

## 1.2. Landasan Hukum

LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- 1). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
- 5). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
- 6). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 7). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- 8). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tentang. Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur. Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ;
- 9). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
- 10). Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005–2025 ;
- 11). Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
- 12). Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 ;
- 13). Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
- 14). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan



Keuangan Daerah.

- 15). Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 ;
- 16). Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
- 17). Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ;
- 18). Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ;
- 19). Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Tentang Daerah Kabupaten Nganjuk ;
- 20). Peraturan Bupati Nganjuk, Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupten Nganjuk Tahun 2018-2023.

### **1.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Tugas, Fungsi Bappeda Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

#### **1. Tugas Pokok.**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah, mempunyai tugas pokok penyusunan dan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

#### **2. Fungsi.**

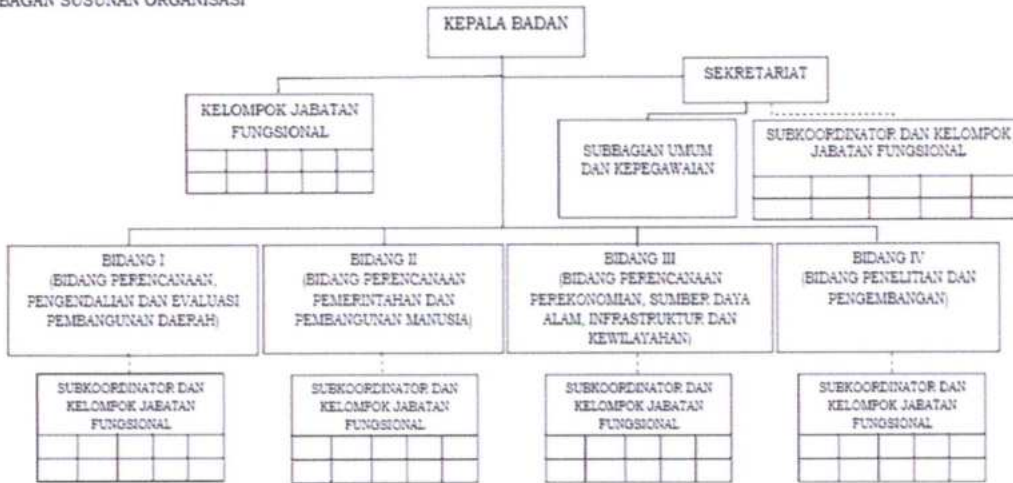
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pengordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah;
- d. penyelenggaraan unsur pendukung Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan; penelitian dan pengembangan;
- f. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Struktur Organisasi :

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN DAN FUNGSI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI



Susunan Organisasi Badan terdiri dari :

- Kepala
- Sekretariat, terdiri dari :
  - Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - Kelompok Subsubstansi Perencanaan
  - Kelompok Subsubstansi Keuangan
- Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah), terdiri dari :
  - Kelompok Subsubstansi Perencanaan dan Pendanaan ;
  - Kelompok Subsubstansi Data dan Informasi ;
  - Kelompok Subsubstansi Pengendalian, Evauasi dan Pelapoan
- Bidang II (Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia), terdiri dari :
  - Kelompok Subsubstansi Perencanaan Pemerintahan Umum ;
  - Kelompok Subsubstansi Perencanaan Pemerintahan Daerah ;
  - Kelompok Subsubstansi Perencanaan Pembangunan Manusia ;
- Bidang III (Bidang Perencanaan Perekonomian, dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan), terdiri dari :
  - Kelompok Subsubstansi Perencanaan Bidang Perekonomian ;
  - Kelompok Subsubstansi Perencanaan Lingkungan Hidup, Kewilayahan dan Sumber Daya Alam ;
  - Kelompok Subsubstansi Perencanaan Infrastruktur ;



- Bidang IV (Bidang Penelitian dan Pengembangan), terdiri dari :
  - Kelompok Subsubstansi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan ;
  - Kelompok Subsubstansi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan ;
  - Kelompok Subsubstansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Masing-masing unsur dari organisasi Bappeda berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- Kepala
  - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah, mempunyai tugas pokok penyusunan dan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
- Sekretariat
  - Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur dilingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Sekretariat mempunyai fungsi :
    - pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    - pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    - pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang: RPJPD, RPJMD dan RKPD);
    - penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    - pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    - pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    - pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian



- pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
- Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah), menyelenggarakan fungsi :
  - pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  - pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
  - pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
  - pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
  - perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
  - Pengoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
  - pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
  - pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
  - penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
  - pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
  - penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya
- Bidang III (Bidang Perencanaan Perekonomian, dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur

dan Kewilayahan), menyelenggarakan fungsi :

- Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - Pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
  - mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
  - Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  - Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
  - Pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
  - Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
  - Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
  - Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
  - Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
- Bidang IV (Bidang Penelitian dan Pengembangan), menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Pemerintahan Daerah;
  - penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan Pemerintahan Daerah;
  - pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Pemerintahan Daerah;
  - pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup Urusan Pemerintahan Daerah;
  - fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
  - pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
  - koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintahan Daerah;
  - pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan Daerah; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
  -



#### 1.4. Isu-isu Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpegang kepada aspek strategis organisasi dan dalam perkembangannya juga menghadapi permasalahan utama (*strategic issued*), yaitu sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan holistik, integratif, tematik, spasial;
- 2) Peningkatan konsistensi antar dokumen RPJMD/RKPD dengan RPJMD/RKPD Provinsi maupun dokumen RPJMN/RKP;
- 3) Peningkatan konsistensi antar dokumen RPJMD/RKPD dengan RPJMD/RKPD Provinsi maupun dokumen RPJMN/RKP
- 4) Mengoptimalkan partisipasi *stakeholders* dalam proses perencanaan pembangunan daerah ;
- 5) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- 6) Peningkatan kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Perguruan Tinggi atau Lembaga Penerbit Jurnal Ilmiah ;
- 7) Rekrutmen tenaga Fungsional Peneliti.

#### 1.6. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

##### **Bab I   Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

##### **Bab II   Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

##### **Bab III  Akuntabilitas Kinerja**

###### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan ;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;



7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **Bab II**

### **Perencanaan Kinerja**

#### **2.1. Rencana Strategis**

##### **2.1.1 Visi dan Misi Bupati.**

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 adalah : **“Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat” Slogan (Nganjuk Nyawiji Bangun Deso Noto Kutho).**

Misi untuk mewujudkan Visi dalam RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat ;
- 2) Meningkatkan kinerja Birokrasi bersih, profesional dan akuntabel (*accountable*) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan ;
- 3) Meningkatkan kualitas, pelayanan dan mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas ;
- 4) Meningkatkan keberpihakan Pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal ;
- 5) Meningkatkan pembangunan sektor pariwisata dan sektor produktif lainnya yang didukung pengembangan kebanggaan terhadap kesenian dan kebudayaan berbasis kearifan lokal serta teknologi tepat guna ;
- 6) Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Bappeda merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang memiliki fungsi dalam bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan memiliki peran dalam pencapaian misi ke-2 RPJMD 2018-2023, yaitu **“Meningkatkan kinerja Birokrasi bersih, profesional dan akuntabel (*accountable*) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan”**. Penentuan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun, sesuai yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Nganjuk 2018-2023 melalui Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

##### **2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.**

Penentuan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan perencanaan kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun, sesuai yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda Kabupaten Nganjuk 2018-2023 melalui Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis



## Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

Untuk memberikan arah bagi tercapainya tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan, disusunlah langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2018-2023) yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Bappeda dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk 2018-2023. Program yang sesuai dengan Tupoksi Bappeda dan keterkaitannya dengan Tujuan dan Sasaran serta kebijakan strategis, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan**

| Tujuan/Sasaran   | Indikator Tujuan/Sasaran  | Strategi  | Arah Kebijakan   |
|--|---|---|--|
| <b>Tujuan 1 :</b><br>Terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah dinamis                    |   |   |  |
| <b>Sasaran 1 :</b><br>Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis | 1) % Kesesuaian muatan RKPD dengan RPJMD<br>2) % Capaian sasaran Pembangunan daerah $\geq$ 80 % | 1) Peningkatan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;<br>2) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah | 1) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah ;<br>2) Meningkatkan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah ;<br>3) Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah ;<br>4) Meningkatkan koordinasi sinergitas dan harmonisasi, asistensi, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah |
| <b>Tujuan 2 :</b><br>Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan Daerah yang implementatif         |   |   |  |
| <b>Sasaran 2 :</b><br>Meningkatnya penelitian dan pengembangan yang implementatif              | % pemanfaatan hasil kelibangan  | Peningkatan penelitian , pengembangan dan inovasi daerah  | 1) Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan<br>2) Meningkatkan pengembangan inovasi dan teknologi daerah  |

LKJIP Bappeda Kab. Nganjuk 2023

## 2.2. Rencana Kinerja Tahunan.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran strategis Bappeda Kabupaten Nganjuk ditetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai setiap tahun serta program kegiatan beserta anggaran. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kinerja dengan tujuan sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah ; sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Rencana Kinerja Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 berisi seperti pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Rencana Kinerja Tahun 2023**

| No.  | Sasaran Strategis  | Indikator Sasaran                                   | Target | Program   | Kegiatan           | Sub Kegiatan           |
|--|--|---|--------|---|--------------------|------------------------|
| 1.   | Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis | 1) % kesesuaian muatan antara RKPD dengan RPJMD.    | 100    | 1) Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;        | 3 Kegiatan         | 3 sub kegiatan         |
|  |  |   |        | <b>Jumlah</b>   | <b>3 Kegiatan</b>  | <b>3 sub kegiatan</b>  |
|  |  | 2) % Capaian sasaran pembangunan daerah $\geq$ 80 % | 100    | 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        | 6 kegiatan         | 18 sub kegiatan        |
|  |  |   |        | 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 3 kegiatan         | 6 sub kegiatan         |
|  |  |   |        | <b>Jumlah</b>   | <b>9 kegiatan</b>  | <b>24 sub kegiatan</b> |
| <b>Jumlah kegiatan Sasaran 1</b>               |  |   |        |   | <b>12 kegiatan</b> | <b>27 sub kegiatan</b> |
| 2.   | Meningkatnya penelitian dan pengembangan yang implementatif              | % pemanfaatan hasil kelitbangan.                    | 100    | Program Penelitian dan Pengembangan                                   | 4 Kegiatan         | 10 sub kegiatan        |
|  |  |   |        |   |                    |                        |
| <b>Jumlah kegiatan seluruh sasaran 1 dan 2</b> |  |   |        |   | <b>16 Kegiatan</b> | <b>37 sub kegiatan</b> |

LKJIP Bappeda Kab. Nganjuk 2023

Seiring dengan perubahan kebijakan nasional perencanaan dan penganggaran dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdampak pada perubahan secara signifikan nomenklatur program, kegiatan, indikator program/kegiatan beserta targetnya. Proses perubahan diawali dengan pemetaan/mapping program kegiatan yang sesuai dengan rumpun nomenklatur program kegiatan menyajikan alternatif-alternatif perumpunan organisasi berdasarkan kondisi di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Klasifikasi dan kodefikasi organisasi bersifat baku yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan unsur-unsur yang melaksanakan urusan pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam tabel 2.2 diatas.

Hasil capaian kinerja sasaran tersebut dilakukan melalui program /kegiatan/ sub kegiatan dan alokasi anggaran, sebagai berikut :



**Tabel 2.3**  
**Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun 2022**

| <b>Program</b>  | <b>Kegiatan / Sub Kegiatan</b>  | <b>Anggaran</b>         |
|---|---|-------------------------|
| <b>A. Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;</b> | <b>1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>  | <b>794.462.550,00</b>   |
|   | 1) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota    | 794.462.550,00          |
|   | <b>2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b> | <b>50.025.700,00</b>    |
|   | 1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                   | 50.025.700,00           |
|   | <b>3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>            | <b>74.347.000,00</b>    |
|   | 1) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah           | 74.347.000,00           |
|   | <b>Jumlah program 1</b>   | <b>918,835,250.00</b>   |
| <b>B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                      | <b>34,653,000.00</b>    |
|   | 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 9.900.000,00            |
|   | 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD        | 12.864.000,00           |
|   | 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 11.889.000,00           |
|   | <b>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>5,405,801,000.00</b> |
|   | 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 5.375.841.000,00        |
|   | 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                  | 9.770.000,00            |
|   | 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                | 20.190.000,00           |
|   | <b>3. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>469,409,620.00</b>   |
|   | 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                             | 5.993.220,00            |
|   | 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | 105.848.000,00          |
|   | 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 48.645.900,00           |
|   | 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 28.037.500,00           |
|   | 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 280.885.000,00          |
|   | <b>4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                      | <b>439,490,000.00</b>   |
|   | 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 439,490,000.00          |
|   | <b>5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                  | <b>216,720,000.00</b>   |
|   | 2) Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 3,650,000.00            |
|   | 3) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                      | 199,800,000.00          |
|   | 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 13,270,000.00           |
| 6.  | <b>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                 | <b>776,653,000.00</b>   |

| Program  | Kegiatan / Sub Kegiatan  | Anggaran                |
|--|--|-------------------------|
|  | 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 393,144,950.00          |
|  | 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 318,611,500.00          |
|  | 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 64,896,550.00           |
|  | <b>Jumlah program 2</b>  | <b>7,342,726,620.00</b> |
| <b>C. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b> | <b>1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>                                       | <b>397,500,000.00</b>   |
|  | 1) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan            | 97,500,000.00           |
|  | 2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia     | 300,000,000.00          |
|  | <b>2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>                                    | <b>125,933,650.00</b>   |
|  | 1) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian            | 79,482,000.00           |
|  | 2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                     | 46,451,650.00           |
|  | <b>3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>  | <b>214,020,539.00</b>   |
|  | 1) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur           | 114,392,539.00          |
|  | 2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan             | 99,628,000.00           |
|  | <b>Jumlah program 3</b>  | <b>737,454,189.00</b>   |
| <b>D. Program Penelitian, Pengembangan dan Pengembangan Daerah</b>           | <b>1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>                 | <b>450,000,000.00</b>   |
|  | 1) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum                       | 450,000,000.00          |
|  | <b>2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>   | <b>125,000,000.00</b>   |
|  | 1) Penelitian dan Pengembangan Pariwisata  | 125,000,000.00          |
|  | <b>3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>   | <b>360,419,050.00</b>   |
|  | 1) Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan   | 163,580,800.00          |
|  | 2) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan  | 25,000,000.00           |
|  | 3) Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup  | 115,088,250.00          |
|  | 4) Penelitian dan Pengembangan Kehutanan   | 56,750,000.00           |



| <b>Program</b> | <b>Kegiatan / Sub Kegiatan</b>  | <b>Anggaran</b>          |
|----------------|---|--------------------------|
|                | <b>4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>  | <b>252,000,000.00</b>    |
|                | 1) Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                        | 120,000,000.00           |
|                | 2) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif | 72,000,000.00            |
|                | 3) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan   | 30,000,000.00            |
|                | 4) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual  | 30,000,000.00            |
|                | <b>Jumlah program 3</b>   | <b>1,187,419,050.00</b>  |
|                | <b>Jumlah keseluruhan program</b>   | <b>10,186,435,109.00</b> |

LKjIP Bappeda Kab. Nganjuk 2023

### 2.3. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka perlu disusunlah suatu penetapan kinerja pada suatu pemerintahan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja memuat 2 (dua) sasaran strategis Perangkat Daerah dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama ditambahkan juga indikator kinerja individu Kepala Perangkat Daerah guna mengakomodir tugas pokok dan fungsi. Target-target setiap indikator sasaran pada penetapan kinerja diperjanjikan tahun 2023, sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2023**

| No.<br>(1) | Sasaran Strategis<br>(2)   | Indikator Kinerja<br>(3)                         | Target<br>(4) |
|------------|--|--|---------------|
| 1.1        | Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis | % Kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD.           | 100 %         |
|            |  | % Capaian sasaran Pembangunan daerah $\geq$ 80 % | 100 %         |
| 2.1        | Meningkatnya penelitian dan pengembangan yang implementatif              | % pemanfaatan hasil kelitbangan                  | 100 %         |

LKjIP Bappeda Kab. Nganjuk 2023

|    | Program  | Anggaran                     |
|----|--|------------------------------|
| 1. | Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;        | Rp. 918,835,250.00           |
| 2. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        | Rp. 7,342,726,620.00         |
| 3. | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp. 737,454,189.00           |
| 4. | Program Penelitian, Pengembangan dan Pengembangan Daerah           | Rp. 1,187,419,050.00         |
|    |  | <b>Rp. 10,186,435,109.00</b> |

## **Bab III**

### **Akuntabilitas Kinerja**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja telah dilaksanakan Bappeda Kabupaten Nganjuk sesuai target kinerja dan alokasi anggaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Pengukuran ini digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Capaian kinerja sasaran Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2023. Penilaian dilakukan dengan memberikan peringkat capaian kinerja sesuai dengan kategori kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| <b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b> | <b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b> |
|---|---|
| 91 % ≤ 100 %                            | Sangat Tinggi                               |
| 76 % ≤ 90 %                             | Tinggi                                      |
| 66 % ≤ 75 %                             | Sedang                                      |
| 51 % ≤ 65 %                             | Rendah                                      |
| ≤ 50 %                                  | Sangat Rendah                               |

*Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kabupaten Nganjuk beserta target capaian realisasinya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya dengan rincian sebagai berikut :

##### **3.1.1 Perbandingan Target Dan Relisasi Kinerja Tahun 2023**

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 Bappeda Kabupaten Nganjuk telah menetapkan 3 (tiga) target kinerja yang akan dicapai di Tahun 2022, untuk selanjutnya akan dilakukan pengukurannya dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2023 agar diketahui hasilnya setelah Tahun Anggaran 2023 berakhir. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.1.1**  
**Realisasi Kinerja Tahun 2023**

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                                   | Target | Realisasi    | % Capaian     | Kriteria             |
|--|---|--------|--------------|---------------|----------------------|
| 1  | 2   | 3      | 4            | 5             | 6                    |
| <b>Terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah dinamis</b>                      |   |        |              |               |                      |
| <b>1. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis</b> | 1. % Kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD.           | 100 %  | 94,90%       | 94,90%        | <b>Sangat Tinggi</b> |
|  | 2. % Capaian sasaran Pembangunan daerah $\geq$ 80 % | 100 %  | 83,33%       | 83,33%        | <b>Tinggi</b>        |
|  | <b>Rata-rata capaian Sasaran I</b>                  |        |              | <b>89,11%</b> | <b>Tinggi</b>        |
| <b>Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan Daerah yang implementatif</b>           |   |        |              |               |                      |
| <b>1. Meningkatnya penelitian dan pengembangan yang implementatif</b>              | % pemanfaatan hasil kelitbangan                     | 100 %  | 100 %        | 100 %         | <b>Sangat Tinggi</b> |
|  | <b>Rata-rata capaian Sasaran II</b>                 |        | <b>100 %</b> | <b>100 %</b>  | <b>Sangat Tinggi</b> |

LKjIP Bappeda Kab. Nganjuk 2023

Hasil pengukuran kinerja pada Sasaran I “Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis” diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu :

1. Kesesuaian muatan RKPD dengan RPJMD dinilai dari konsistensi perumusan Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah dengan mengacu fokus pembangunan tahun rencana. Fokus pembangunan tahun kelima RPJMD Tahun 2028-2023 adalah “Terwujudnya kemandirian ekonomi, kemantapan infrastruktur, masyarakat yang sejahtera, aman, harmonis, berkepribadian dan berkebudayaan serta tata kelola pemerintahan yang baik” dan dijabarkan dalam 14 Program Unggulan Bupati/Wakil Bupati, kemudian dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 beserta perubahannya. Struktur Perubahan RPJMD Tahun 2028-2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2023 diilustrasikan dalam gambar berikut:



2. Capaian sasaran Pembangunan daerah  $\geq 80\%$  atau dikategorikan tinggi, yaitu mengukur pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dari 18 sasaran strategis yang telah ditetapkan ada sebanyak 15 Sasaran strategis yang tercapai, 3 Sasaran strategis tidak tercapai, maka didapatkan perhitungan capaian sebesar 83,33%. Dengan hasil tersebut maka Indikator “Capaian sasaran Pembangunan daerah  $\geq 80\%$ ” dapat dikatakan **Tercapai**

Hasil pengukuran kinerja pada Sasaran II “Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif” diukur dengan indikator :

1. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, dengan target sebesar 100 % dan capaian kinerja sebesar 100 %. Hasil ini diperoleh dari 7 dokumen hasil penelitian dan pengembangan /kajian telah ditindaklanjuti sebanyak 7 policy brief hasil dari kelitbangan.

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan melalui program Penelitian dan Pengembangan, secara teknis operasional dilaksanakan 3 kegiatan, sedangkan hasil kinerja berupa output dokumen hasil kajian berasal dari 4 sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan,
  - a) Sub Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum, dokumen yang dihasilkan sebanyak 4 dokumen yaitu :
    - Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pembangunan Daerah;
    - Kajian Optimalisasi Promosi Wisata Kab. Nganjuk Melalui Pendekatan City Branding;
    - Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah;
    - Kajian Efektifitas dan Evisiensi Peneerapan Sewa Kendaraan Dinas
  - b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan,
    - a) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata, dokumen yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen yaitu :
      - Kajian Perencanaan Paiwisata Bendungan Semantok
  - c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
    - a) Sub Kegiatan ,Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, dokumen yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen yaitu :
      - Kajian Pengembangan Industri Genteng Dan Batu Bata
    - b) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, dokumen yang

dihasilkan sebanyak 1 dokumen yaitu :

- Kajian Penanganan Kekeringan Wilayah Nganjuk Utar



### 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Berkenaan Dengan Tahun Sebelumnya.

Setelah diperoleh perbandingan antara target dan realisasi Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2022, berikutnya perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dengan Tahun 2021, setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, Bappeda Kabupaten Nganjuk melakukan Reviu Terhadap Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga Indikator Kinerja Sasaran “% *Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW*” dinilai tidak relevan dengan urusan yang diampu dan dihapus, untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja, sebagai berikut :

**Tabel 3.1.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022 dan 2023**

| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                                   | Target       | Realisasi Tahun |               |               |
|--|---|--------------|-----------------|---------------|---------------|
|  |   |              | 2021            | 2022          | 2023          |
| 1  | 2   | 3            | 4               | 5             |               |
| <b>Terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah dinamis</b>            |   |              |                 |               |               |
| Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis | 1. % Kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPd.           | 100 %        | 100%            | 100%          | 95,60%        |
|  | 2. % Capaian sasaran Pembangunan daerah $\geq$ 80 % | 100 %        | 94,44%          | 88,88%        | 83,33%        |
|  | 3. % Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW     | 100 %        | 100%            | Reviu         | Reviu         |
|  | <b>Rata-rata capaian sasaran 1</b>                  | <b>100 %</b> | <b>98,70%</b>   | <b>98,70%</b> | <b>89,47%</b> |
| <b>Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan Daerah yang implementatif</b> |   |              |                 |               |               |
| Meningkatnya penelitian dan pengembangan yang implementatif              | 1. % pemanfaatan hasil kelitbangan                  | 100 %        | 91%             | 80%           | 100%          |
|  | <b>Rata-rata capaian sasaran 2</b>                  | <b>100 %</b> | <b>91%</b>      | <b>80%</b>    | <b>100%</b>   |

LKjIP Bappeda Kab. Nganjuk 2023

Capaian Kinerja atas Sasaran I untuk indikator % kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD terdapat penurunan realisasi sebesar 4,4 %, dari tahun 2022/(n-1) sebesar 100% dan pada tahun 2023 (n) menjadi 95,60%.

Penilaian konsistensi Program Pembangunan Daerah/Program Perangkat Daerah diuraikan dalam tabel berikut:

| Struktur Perencanaan | Perubahan RPJMD 2018-2023 | RKPD 2023 | Tingkat Kesesuaian |
|----------------------|---------------------------|-----------|--------------------|
| Program              | 296                       | 283       | 95,60%             |

Capaian Kinerja atas Sasaran I untuk indikator % Capaian sasaran Pembangunan daerah  $\geq 80$  %, terdapat penurunan realisasi dari tahun 2022 (n-1) dari 88,88 % yang diperoleh dari perhitungan jumlah sasaran pada RPJMD yang berjumlah 18 sasaran strategis terdapat 2 sasaran yang tidak mencapai target. Pada tahun 2023 dari 18 sasaran strategis sejumlah 3 sasaran yang tidak mencapai target, maka didapatkan capaian sebesar 83,33%. Dari formulasi perhitungan indikator sasaran maka kinerjanya pada tahun 2023 dapat dikategorikan *tinggi*.

Capaian Kinerja atas Sasaran II untuk indikator % pemanfaatan hasil kelitbangan meningkat dari tahun 2022 (n-1) dimana dari 10 kelitbangan yang telah direncanakan hanya bisa terealisasi sebanyak 8 kajian yang dijadikan policy brief. Pada tahun 2023 dari 7 kelitbangan / kajian yang dilaksanakan seluruhnya telah dijadikan Policy Brief maka didapatkan capaian kinerja sebesar 100%.

### 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Realisasi kinerja Tahun 2023 adalah pelaksanaan kinerja tahun ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2018-2023. Realisasi kinerja Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.3.1  
Target Kinerja Renstra**

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                                   | Target Renstra |       |       |       |       |
|---|---|----------------|-------|-------|-------|-------|
|   |   | 2019           | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
| 1   | 2   | 3              | 4     | 5     | 6     | 7     |
| Terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah dinamis                      |   |                |       |       |       |       |
| 1. Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis | 1. % Kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD.           | 100 %          | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
|   | 2. % Capaian sasaran Pembangunan daerah $\geq 80$ % | 100 %          | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan Daerah yang implementatif           |   |                |       |       |       |       |
| 2. Meningkatkan penelitian dan pengembangan yang implementatif              | % rekomendasi penelitian yang ditindaklanjuti       | 100%           | 100%  | 100%  | 100 % | 100 % |

LKJIP Bappeda Kab. Nganjuk 2023



**Tabel 3.1.3.2**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RENSTRA**

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                                   | Target Akhir RENSTRA | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Kemajuan |
|---|---|----------------------|------------------------------|------------------|
| 1   | 2   | 3                    | 4                            | 5                |
| Terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah dinamis                      |   |                      |                              |                  |
| 1. Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis | 1. % Kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD.           | 100 %                | 95,60%                       | 95,60%           |
|   | 2. % Capaian sasaran Pembangunan daerah $\geq$ 80 % | 100 %                | 83,33%                       | 83,33%           |
| Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan Daerah yang implementatif           |   |                      |                              |                  |
| 2. Meningkatkan penelitian dan pengembangan yang implementatif              | % rekomendasi penelitian yang ditindaklanjuti       | 100%                 | 100%                         | 100%             |

LKJIP BAPPEDA KAB. NGANJUK 2023

Perbandingan realisasi kinerja Sasaran Strategis sampai dengan akhir periode Renstra, pada Sasaran (1) *Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis* diperoleh rata-rata realisasi sebesar 89,47% dengan target yang ditetapkan sebesar 100 % bersifat pengulangan (non kumulatif). Pada Sasaran (2) *Meningkatnya penelitian dan pengembangan yang implementatif*, diperoleh realisasi sebesar 100 % dari target yang ditetapkan sebesar 100% , maka tingkat kemajuannya sebesar 100 %.

### 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional.

**Tabel 3.1.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Nasional**

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                                   | Standar Nasional | Realisasi Kinerja Tahun 2023 |
|---|---|------------------|------------------------------|
| 1   | 2   | 3                | 4                            |
| 1. Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis | 1. % Kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD.           | -                | 95,60%                       |
|   | 2. % Capaian sasaran Pembangunan daerah $\geq$ 80 % | -                | 83,33%                       |
| 2. Meningkatkan penelitian dan pengembangan yang implementatif              | % rekomendasi penelitian yang ditindaklanjuti       | -                | 100%                         |

Dalam hal melaksanakan tugas fungsi tidak ada ukuran Standar Nasional yang ditetapkan untuk Bappeda Kabupaten Nganjuk.



### 3.1.5 Analisis Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja

**Tabel 3.1.5**  
**Analisis Keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja**

| Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                                   | Capaian Kinerja | Tercapai/ Tidak Tercapai |
|---|---|-----------------|--------------------------|
| 1   | 2   | 3               | 4                        |
| Terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah dinamis                      |   |                 |                          |
| 1. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis | 1. % Kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD.           | 95,60%          | Tidak Tercapai           |
|   | 2. % Capaian sasaran Pembangunan daerah $\geq$ 80 % | 83,33%          | Tidak Tercapai           |
| Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan Daerah yang implementatif           |   |                 |                          |
| 2. Meningkatnya penelitian dan pengembangan yang implementatif              | % rekomendasi penelitian yang ditindaklanjuti       | 100%            | Tercapai                 |

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis dapat dilakukan pengukuran melalui media Dokumen Penetapan Kinerja, yaitu dengan membandingkan dengan target dan realisasi yang disajikan dalam formulir Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Nganjuk dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja. Pada Tahun 2023 Bappeda Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Bappeda Kabupaten Nganjuk dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut :

**Tujuan I : Terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan dinamis**

**Sasaran I : Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis**

Sasaran diatas dimaksudkan untuk mengetahui konsistensi antar dokumen perencanaan perangkat daerah dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terhadap program yang dijalankan oleh Perangkat Daerah didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Melalui kegiatan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan hasil capaian sasaran strategis I tahun 2023 dihitung rata-rata sebesar **100 %** Hal ini diketahui melalui indikator untuk mengukur capaian sasaran strategis I sebagai berikut :

- a. Indikator % Kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD
- Target : 100 %
  - Realisasi : 95,60 %
  - Capaian : 95,60 %

Yang dimaksud dengan muatan dalam Indikator dimaksud adalah untuk mengetahui

keselarasan selama proses perencanaan pembangunan daerah antar dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah yang meliputi nomenklatur program, kegiatan beserta indikatornya. Seiring dengan adanya perubahan dokumen perencanaan daerah, maka ditampilkan data masing-masing hasil pemetaan muatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

Kesesuaian muatan antara RKPD dengan RPJMD adalah untuk menganalisis kesesuaian muatan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi aspek program dan indikator program, dengan cara menjumlahkan muatan RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi jumlah muatan RPJMD. yang ditampilkan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**

**Muatan RPJMD Dengan RKPD**

| <b>Muatan</b>     | <b>RPJMD</b> | <b>RKPD</b> | <b>%</b> |
|-------------------|--------------|-------------|----------|
| Program           | 296          | 283         | 95,60%   |
| Indikator Program | 296          | 283         | 95,60%   |

LKjIP Bappeda Kab. Nganjuk 2023

Kegiatan asistensi yang dilakukan dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2023 terhadap penyesuaian yang ada dalam dokumen Perubahan RPJMD dengan dokumen RKPD dihasilkan 95,60% dari target yang ditetapkan sebesar 100 %.

Faktor penyebab capaian kinerja yang tidak sesuai target dikarenakan Proses perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berdasarkan Money Follow Program, selain itu hasil akhir perencanaan pembangunan daerah belum optimal, dikarenakan belum dirumuskan strategi dan arah kebijakan taktis oleh Perangkat Daerah sebagai panduan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

- b. Persentase Capaian sasaran Pembangunan daerah  $\geq 80$  %
  - Target : 18 sasaran daerah
  - Realisasi : 15 sasaran daerah
  - Capaian : 83,33%

Indikator kinerja Persentase Capaian sasaran Pembangunan daerah  $\geq 80$  % adalah untuk menganalisis realisasi sasaran yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dengan jumlah sasaran yang ada di RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Atau rata-rata/capaian  $\leq 80$  % interval nilai realisasi kinerja, dengan menjumlahkan sasaran yang tidak mencapai target dibagi jumlah seluruh sasaran yang ada di RPJMD.

Pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk adalah sebanyak 18 sasaran strategis, dan capaian yang dihasilkan berdasarkan Kategori Pencapaian Adapun capaian sasaran untuk masing-masing Misi pemerintahan adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.9**  
**Capaian Sasaran Misi Pemerintah Daerah**

| Kode  | Sasaran Strategis  | Tercapai | Tidak Tercapai |
|-------|--|----------|----------------|
| 1.1.1 | Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tentram, tertib, dan religius                          | ✓        | -              |
| 2.1.1 | Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik   | ✓        | -              |
| 2.1.2 | Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah  | ✓        | -              |
| 3.1.1 | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat  | ✓        | -              |
| 3.1.2 | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan prestasi pemuda                         | ✓        | -              |
| 3.1.3 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta pengendalian penduduk                          | ✓        | -              |
| 3.1.4 | Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | ✓        | -              |
| 4.1.1 | Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani    | ✓        | -              |
| 4.1.2 | Meningkatnya volume usaha kategori industri dan perdagangan                                    | -        | ✓              |
| 4.1.3 | Meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi Masyarakat                                      | ✓        | -              |
| 4.1.4 | Meningkatnya iklim investasi   | -        | ✓              |
| 4.1.5 | Meningkatnya kemandirian Desa dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan                               | ✓        | -              |
| 5.1.1 | Meningkatnya daya saing pariwisata Daerah  | ✓        | -              |
| 5.1.2 | Meningkatnya pelestarian kebudayaan, kesenian, dan tradisi lokal Daerah.                       | ✓        | -              |
| 6.1.1 | Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum, perumahan rakyat dan perhubungan yang Handal        | ✓        | -              |
| 6.1.2 | Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang daerah   | ✓        | -              |
| 6.1.3 | Meningkatnya kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya alam                               | ✓        | -              |
| 6.1.4 | Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana  | -        | ✓              |

LKPJ Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

Perlu dijelaskan permasalahan capaian kinerja sasaran tidak tercapai adalah Sasaran Kinerja Daerah (1)“Meningkatnya volume usaha kategori industri dan perdagangan”, (2)“ Meningkatkan iklim investasi” dan (3)“ Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana” Sasaran pembangunan yang tidak tercapai di atas terkait dengan sasaran pembangunan ekonomi. Persentase pertumbuhan PDRB kategori industr dan perdagangan di Kabupaten Nganjuk masih tergolong rendah dan masih belum optimal sesuai terget yang ditetapkan. Nilai Investasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi, dalam aspek daya saing daerah Iklim Berinvestasi harus dapat terwujud secara optimal dengan keunggulan masih relatif murah nya upah tenaga kerja di Kabupaten Nganjuk.

Secara formulasi jika dihitung seluruh jumlah sasaran dalam RPJMD dengan jumlah sasaran yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah sesuai dengan data yang diketahui maka pencapaian Indikator Persentase Capaian sasaran Pembangunan daerah  $\geq 80\%$  adalah sebesar 83,33% dengan demikian capaian sasaran pembangunan di Kabupaten Nganjuk masih dapat dikategorikan **tinggi**.



**Tabel 3.11**  
**Capaian Kinerja sasaran I**

| No. | Uraian Indikator                                 | Capaian | Keterangan |
|-----|--|---------|------------|
| 1.  | % Kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD            | 95,60%  |            |
| 2.  | % Capaian sasaran Pembangunan daerah $\geq$ 80 % | 83,33%  |            |
|     | % rata-rata capaian                              | 89,47%  |            |

LKjIP Bappeda Kab. Nganjuk 2023

Dihitung rata rata tiga indikator tersebut diatas maka capaian kinerja Sasaran I yaitu “Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis” sebesar 89,47% sesuai dengan interval capaian realisasi kinerja dapat dikategorikan **tinggi**. Hal ini telah dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung keberhasilan kinerja Sasaran I yaitu :

Sasaran ini dicapai melalui pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, yang operasionalisasinya didukung oleh kegiatan-kegiatan :

- 1) Pendampingan/Asistensi dalam menyusun program dan kegiatan melalui koordinasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan;
- 2) Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi perencanaan;
- 3) Penyelenggaraan Musrenbang tingkat kabupaten ;
- 4) Penyusunan dokumen RKPD;
- 5) Perencanaan dan Penganggaran Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK).

Analisis terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada Sasaran I **Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis** dengan Indikator : % Kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD dan % Capaian sasaran Pembangunan daerah  $\geq$  80 %, adalah dengan Menyusun isu aktual pembangunan daerah, Menyeleraskan proses teknokratik, politis, top down dan bottom up serta partisipatif dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah, Menepakati fokus tematik dan prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, Melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui SIPD.

---

**Tujuan II** : **Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan Daerah yang inovatif.**

---

**Sasaran II** : **Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif**

---

Sasaran strategis ke 2 (dua) diatas, yaitu “**Meningkatnya penelitian dan pengembangan yang implementatif**” diukur dengan Indikator Kinerja “**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan**”, indikator ini untuk mengukur kualitas kegiatan penelitian dan pengembangan dengan harapan rekomendasi hasil penelitian dapat ditindaklanjuti oleh OPD terkait untuk tahun berikutnya. Penelitian dan pengembangan (Litbang) merupakan salah satu urusan yang menjadi tugas pokok fungsi Bappeda Kabupaten Nganjuk.

c. Indikator Kinerja % pemanfaatan hasil kelitbangan

- Target : 100 %
- Realisasi : 100 %
- Capaian : 100 %

Indikator tersebut ditetapkan untuk mengetahui jumlah kegiatan Penelitian dan Pengembangan berupa dokumen hasil kajian/penelitian yang dimanfaatkan/diitindaklanjuti sebagai rekomendasi dalam mengambil kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Hasil capaian dari indikator kinerja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Jumlah dokumen kelitbangan yang dilaksanakan : 7 dokumen
- Jumlah dokumen yang dimanfaatkan (*Policy Brief*) : 7 dokumen
- % Hasil Capaian indikator kinerja : 100 %
- 

Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan melalui program Penelitian dan Pengembangan, secara teknis operasional dilaksanakan 3 kegiatan, sedangkan hasil kinerja berupa output dokumen hasil kajian berasal dari 4 sub kegiatan sebagai berikut :

- d. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan,
  - b) Sub Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum, dokumen yang dihasilkan sebanyak 4 dokumen yaitu :
    - Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pembangunan Daerah;
    - Kajian Optimalisasi Promosi Wisata Kab. Nganjuk Melalui Pendekatan City Branding;
    - Kajian Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah;
    - Kajian Efektifitas dan Evisiensi Peneerapan Sewa Kendaraan Dinas
- e. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan,
  - b) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata, dokumen yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen yaitu :
    - Kajian Perencanaan Paiwisata Bendungan Semantok
- f. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
  - c) Sub Kegiatan ,Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, dokumen yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen yaitu :
    - Kajian Pengembangan Industri Genteng Dan Batu Bata
  - d) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, dokumen yang dihasilkan sebanyak 1 dokumen yaitu :
    - Kajian Penanganan Kekeringan Wilayah Nganjuk Utara
- g. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kinerja penelitian dan pengembangan melalui dukungan sub kegiatan sebagai berikut :
  - a) Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi;
  - b) Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi

- di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi;
- c) Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif;
  - d) Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan;
  - e) Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Kinerja Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dapat dilihat dari Indeks Inovasi Daerah yang dimana pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Nganjuk berpredikat **“Tidak Inovatif”** pada Tahun 2022 berhasil mendapatkan predikat Kabupaten/Kota yang **“Inovatif”**

Analisis tercapainya kinerja yang telah ditetapkan pada Sasaran II **“Meningkatnya penelitian dan pengembangan yang implementatif”** dikarenakan ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran dan adanya refocusing terhadap kegiatan yang dirasa tidak dapat dilaksanakan sesuai tahapan pengadaan barang dan jasa serta kurang prioritas dalam menunjang unsur perencanaan.

### **3.1.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Penyajian data efisiensi penggunaan sumber daya adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi dengan membandingkan antara hasil persentase capaian kinerja dibandingkan dengan persentase penyerapan anggaran, sebagaimana tabel berikut :



**Tabel : 3.1.6**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

| No | Sasaran  | Indikator Kinerja  | % Capaian Kinerja | % Realisasi Anggaran | Tingkat Efisiensi |
|----|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|
|    | <b>Terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah dinamis</b>            |  |                   |                      |                   |
| 1  | Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis | 1. % Kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD<br>2. % Capaian sasaran Pembangunan daerah $\geq$ 80 %. | 95,60%            | 92,90 %              | 2%                |
|    | Rata-rata efisiensi sasaran kinerja I                                    |  |                   |                      | 4%                |
|    | <b>Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan Daerah yang implementatif</b> |  |                   |                      |                   |
| 1  | Meningkatnya penelitian dan pengembangan yang implementatif              | % pemanfaatan hasil kelitbangan  | 100 %             | 81,82%               | 18,18%            |
|    | Rata-rata efisiensi sasaran kinerja II                                   |  |                   | 100 %                | 18,18             |

LKjIP Bappeda Kab. Nganjuk 2023

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya pada Sasaran I yang ditunjang dengan realisasi penyerapan anggaran pada program sebagai berikut :

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan serapan anggaran sebesar 92,90 %
- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan serapan anggaran sebesar 90,76 %

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya pada Sasaran II yang ditunjang dengan realisasi penyerapan anggaran pada program sebagai berikut :

- 1) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, dengan serapan anggaran sebesar 81.82 %

### 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

| No  | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Program/ Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Capaian Kinerja |
|-----|--|---|--|--|-----------------|
| 1.  | Terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah yang dinamis              | Nilai AKIP daerah aspek perencanaan kinerja               |  |  | 22,18           |
| 1.1 | Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis | % kesesuaian muatan RKPD dan RPJMD                        | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah                    | % kesesuaian usulan kegiatan pembangunan dalam RKPD terhadap prioritas tahunan daerah  | 97,32           |
|     |  |   |  | % data dan informasi pembangunan daerah yang di update   | 100             |
|     |  |   |  | % rekomendasi pengendalian dan evaluasi pembangunan yang ditindaklanjuti   | 92,31           |
|     |  |   | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan   | jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai standar   | 4<br>Dokumen    |
|     |  |   | Analisa Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang di Update  | 2<br>Dokumen    |
|     |  |   | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah           | Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan yang dievaluasi dan ditindaklanjuti.  | 2<br>Dokumen    |
|     |  | Persentase Capaian sasaran Pembangunan daerah $\geq 80\%$ | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah                   | Persentase tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah yang baik (sesuai prioritas Nasional, Provinsi dan Peraturan yang ada) | 100%            |
|     |  |   | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia                   | Jumlah Dokumen Perangkat daerah yang Diasistensi, Dimonev, Diverifikasi dan Diselaraskan.  | 78<br>Dokumen   |

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                        | Program/ Kegiatan  | Indikator Kinerja   | Capaian Kinerja |
|-----|---|--|--|---|-----------------|
|     |   |  | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                    | Jumlah Dokumen Perangkat daerah yang Diasistinsi, Dimonev, Diverifikasi dan Diselaraskan. | 16 Dokumen      |
|     |   |  | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan                              | Jumlah Dokumen Perangkat daerah yang Diasistinsi, Dimonev, Diverifikasi dan Diselaraskan. | 10 Dokumen      |
| 2   | Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan Daerah yang implementatif | Presentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan |  |   | 100%            |
| 2.1 | Meningkatnya penelitian dan pengembangan yang implementatif       | % pemanfaatan hasil kelitbangan          | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah   | Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan  | 100%            |
|     |   |  |  | % Hasil Inovasi dan Teknologi Daerah yang Dikembangkan                                    | 67,7%           |
|     |   |  | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan | Jumlah kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan           | 4 Dokumen       |
|     |   |  | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                               | Jumlah Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan   | 1 Dokumen       |
|     |   |  | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                               | Jumlah Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan   | 2 Dokumen       |
|     |   |  | Pengembangan Inovasi dan Teknologi   | Jumlah Inovasi dan Teknologi Daerah yang Dikembangkan                                     | 5 laporan       |

Pengukuran capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dilaksanakan dalam rangka pengendalian dan evaluasi atas target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah. Analisis Kinerja Program Sebagai Faktor Penghambat atau Pendorong/Keberhasilan Tercapainya Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :



## I. Sasaran I “Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis”

Ketercapaian Sasaran I didapatkan dari perhitungan 2 indikator, yaitu :

### 1) % Kesesuaian Muatan RPJMD dengan RKPD.

Dalam menentukan hasil dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung kesesuaian muatan/keselarasan Program dalam RPJMD yang diakomodir dalam RKPD. Program yang menunjang adalah **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah** yang didalamnya terdapat perhitungan atas Kesesuaian usulan kegiatan pembangunan dalam RKPD terhadap prioritas tahunan daerah, ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas dan hasil rekomendasi atas pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti sebagai instrumen penyusunan dokumen perencanaan. Terdapat 279 Program dalam RKPD pada Tahun 2023 yang sesuai muatan nya/selaras dengan jumlah Program dokumen RPJMD, didapatkan capaian sebesar 94,90%, dengan adanya Sistem Informasi Perencanaan (SIPD) dapat menjaga konsistensi dan keselarasan Program/Kegiatan.

### 2) % Capaian Sasaran Pembangunan Daerah $\geq 80$ %.

Keberhasilan Pemerintah Daerah dapat diproyeksikan melalui tercapainya sasaran strategis daerah  $\geq 80$  % yang dapat dikategorikan Tinggi/Tercapai. Program yang menunjang adalah **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** dimana hasil dari program ini adalah Pengkoordinasian, Monitoring dan Evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan serta Sinkronisasi penetapan program prioritas dalam melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sehingga lebih tepat sasaran.

## II. Sasaran II “Meningkatnya efektifitas penelitian dan pengembangan”

Ketercapaian Sasaran II didapatkan dari perhitungan indikator :

### 1) % Pemanfaatan Hasil Kelitbangan.

Pada **Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah** hasil yang diharapkan adalah Dokumen hasil penelitian dan pengembangan dapat ditindaklanjuti sebagai bahan rumusan pengambilan kebijakan. Pada Tahun 2023 dari seluruh rencana kelitbangan direalisasikan 7 studi/kajian yang telah dijadikan *Policy Brief* , dengan capaian kinerja sebesar 100% sesuai dengan target kinerja program yang ditetapkan sebesar 100%.

**TABEL : 3.2**  
**REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

| Kode Rekening   | Program/Kegiatan   | Belanja          |                  |                  |       |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|-------|
|                 |  | Anggaran (Rp.)   | Realisasi (Rp.)  | Sisa (Rp.)       | (%)   |
| 1               | 2  | 3                | 4                | 5                |       |
| 5.01.01         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  | 7,342,726,620.00 | 5,427,217,956.00 | 1,476,018,664.00 | 73.91 |
| 5.01.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 34,653,000.00    | 29,720,000.00    | 4,933,000.00     | 85.76 |
| 5.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 9,900,000.00     | 9,433,000.00     | 467,000.00       | 95.28 |
| 5.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | 12,864,000.00    | 9,390,000.00     | 3,474,000.00     | 72.99 |
| 5.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 11,889,000.00    | 10,897,000.00    | 992,000.00       | 91.66 |
| 5.01.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 5,405,801,000.00 | 4,172,758,330.00 | 1,233,042,670.00 | 77.19 |
| 5.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 5,375,841,000.00 | 4,145,620,330.00 | 1,230,220,670.00 | 77.12 |
| 5.01.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | 9,770,000.00     | 7,490,000.00     | 2,280,000.00     | 76.66 |
| 5.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                      | 20,190,000.00    | 19,648,000.00    | 542,000.00       | 97.32 |
| 5.01.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 469,409,620.00   | 444,195,448.00   | 25,214,172.00    | 94.63 |
| 5.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 5,993,220.00     | 5,951,950.00     | 41,270.00        | 99.31 |
| 5.01.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | 105,848,000.00   | 105,420,150.00   | 427,850.00       | 99.60 |
| 5.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 48,645,900.00    | 44,373,500.00    | 4,272,400.00     | 91.22 |
| 5.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  | 28,037,500.00    | 28,024,445.00    | 13,055.00        | 99.95 |
| 5.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 280,885,000.00   | 260,425,403.00   | 20,459,597.00    | 92.72 |
| 5.01.01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 439,490,000.00   | 417,940,000.00   | 21,550,000.00    | 95.10 |
| 5.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 439,490,000.00   | 417,940,000.00   | 21,550,000.00    | 95.10 |
| 5.01.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 216,720,000.00   | 185,401,118.00   | 31,318,882.00    | 85.55 |
| 5.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 3,650,000.00     | 3,605,100.00     | 44,900.00        | 98.77 |
| 5.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 199,800,000.00   | 171,979,018.00   | 27,820,982.00    | 86.08 |
| 5.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 13,270,000.00    | 9,817,000.00     | 3,453,000.00     | 73.98 |
| 5.01.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 776,653,000.00   | 595,143,060.00   | 181,509,940.00   | 76.63 |
| 5.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 393,144,950.00   | 311,186,763.00   | 81,958,187.00    | 79.15 |
| 5.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 318,611,500.00   | 221,123,212.00   | 97,488,288.00    | 69.40 |
| 5.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 64,896,550.00    | 62,833,085.00    | 2,063,465.00     | 96.82 |



| Kode Rekening   | Program/Kegiatan  | Belanja          |                 |                |       |
|-----------------|---|------------------|-----------------|----------------|-------|
|                 |   | Anggaran (Rp.)   | Realisasi (Rp.) | Sisa (Rp.)     | (%)   |
| 5.01.02         | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah   | 918,835,250.00   | 896,839,374.00  | 21,995,876.00  | 97.61 |
| 5.01.02.2.01    | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan  | 794,462,550.00   | 781,440,358.00  | 13,022,192.00  | 98.36 |
| 5.01.02.2.01.07 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                   | 794,462,550.00   | 781,440,358.00  | 13,022,192.00  | 98.36 |
| 5.01.02.2.02    | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                       | 50,025,700.00    | 49,474,500.00   | 551,200.00     | 98.90 |
| 5.01.02.2.02.01 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah  | 50,025,700.00    | 49,474,500.00   | 551,200.00     | 98.90 |
| 5.01.02.2.03    | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                  | 74,347,000.00    | 65,924,516.00   | 8,422,484.00   | 88.67 |
| 5.01.02.2.03.03 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                          | 74,347,000.00    | 65,924,516.00   | 8,422,484.00   | 88.67 |
| 5.01.03         | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah  | 737,454,189.00   | 658,244,565.00  | 79,209,624.00  | 89.26 |
| 5.01.03.02.01   | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  | 397,500,000.00   | 345,907,196.00  | 51,592,804.00  | 87.02 |
| 5.01.03.2.01.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan        | 97,500,000.00    | 83,963,750.00   | 13,536,250.00  | 86.12 |
| 5.01.03.2.01.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 300,000,000.00   | 261,943,446.00  | 38,056,554.00  | 87.31 |
| 5.01.03.2.02    | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                       | 125,933,650.00   | 117,197,777.00  | 8,735,873.00   | 93.06 |
| 5.01.03.2.02.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian        | 79,482,000.00    | 74,107,077.00   | 5,374,923.00   | 93.24 |
| 5.01.03.2.02.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                 | 46,451,650.00    | 43,090,700.00   | 3,360,950.00   | 92.76 |
| 5.01.03.2.03    | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan   | 214,020,539.00   | 195,139,592.00  | 18,880,947.00  | 91.18 |
| 5.01.03.2.03.04 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur       | 114,392,539.00   | 107,627,800.00  | 6,764,739.00   | 94.09 |
| 5.01.03.2.03.08 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan         | 99,628,000.00    | 87,511,792.00   | 12,116,208.00  | 87.84 |
| 5.05.02         | Penelitian dan Pengembangan   | 1,187,419,050.00 | 971,565,074.00  | 215,853,976.00 | 81.82 |



| Kode Rekening    | Program/Kegiatan   | Belanja          |                 |                |       |
|------------------|--|------------------|-----------------|----------------|-------|
|                  |  | Anggaran (Rp.)   | Realisasi (Rp.) | Sisa (Rp.)     | (%)   |
| 5.05.02          | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah   | 1,187,419,050.00 | 971,565,074.00  | 215,853,976.00 | 81.82 |
| 5.05.02.01       | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan         | 450,000,000.00   | 432,414,024.00  | 17,585,976.00  | 96.09 |
| 5.05.02.2.01.02  | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum        | 450,000,000.00   | 432,414,024.00  | 17,585,976.00  | 96.09 |
| 5.05.02.02       | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan                                       | 125,000,000.00   | 116,791,740.00  | 8,208,260.00   | 93.43 |
| 5.05.02.2.02.05  | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata   | 125,000,000.00   | 116,791,740.00  | 8,208,260.00   | 93.43 |
| 5.05.02.2.03     | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                       | 360,419,050.00   | 276,418,720.00  | 84,000,330.00  | 76.69 |
| 5.05.02.2.03.02  | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan  | 163,580,800.00   | 139,599,150.00  | 23,981,650.00  | 85.34 |
| 5.05.02.2.03.04  | Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan                                     | 25,000,000.00    | 7,554,000.00    | 17,446,000.00  | 30.22 |
| 5.05.02.2.03.07  | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup   | 115,088,250.00   | 105,625,770.00  | 9,462,480.00   | 91.78 |
| 5.05.02.2.03.08  | Penelitian dan Pengembangan Kehutanan  | 56,750,000.00    | 23,639,800.00   | 33,110,200.00  | 41.66 |
| 5.05.02.2.04     | Pengembangan Inovasi dan Teknologi   | 252,000,000.00   | 145,940,590.00  | 106,059,410.00 | 57.91 |
| 5.05.02..2.04.01 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi                       | 120,000,000.00   | 90,809,696.00   | 29,190,304.00  | 75.67 |
| 5.05.02..2.04.03 | Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 72,000,000.00    | 35,159,394.00   | 36,840,606.00  | 48.83 |
| 5.05.02..2.04.04 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan   | 30,000,000.00    | 8,750,500.00    | 21,249,500.00  | 29.17 |
| 5.05.02..2.04.05 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual  | 30,000,000.00    | 11,221,000.00   | 18,779,000.00  | 37.40 |

Sumber data : LKPD Bappeda Kab. Nganjuk 2023

## 2.1 Realisasi Anggaran.

### 3.2.1 Alokasi Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk mewujudkan sasaran kinerja Bappeda Kabupaten Nganjuk sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023, tertuang dalam 4 program , 16 kegiatan berdasarkan DPPA Tahun 2023 dengan pagu anggaran sebagai berikut :

**Tabel 3.14**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2023**

| Uraian                           | Pagu Anggaran            | Realisasi               | %            |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Belanja</b>                   | <b>10.186.435.109,00</b> | <b>8.373.477.689,00</b> | <b>82,20</b> |
| <b>Belanja Operasi</b>           | <b>9.745.745.109,00</b>  | <b>7.955.537.689,00</b> | <b>81,63</b> |
| - Blj. Pegawai                   | 5.484.021.000,00         | 4.250.950.330,00        | 77,52        |
| - Blj. Barang dan Jasa           | 4.261.724.109,00         | 3.704.587.359,00        | 86,93        |
| <b>Belanja Modal</b>             | <b>440.690.000,00</b>    | <b>417.940.000,00</b>   | <b>94,84</b> |
| - Blj. Modal Peralatan dan Mesin | 440.690.000,00           | 417.940.000,00          | 94,84        |
| - Blj. Modal Aset tetap lainnya  | 0,00                     | 0                       | 0            |

LKPD Bappeda Kab. Nganjuk 2023

Dilihat dari tabel diatas bahwa anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan strategis Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 pos Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari agar dapat memberi manfaat jangka panjang. Realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 8.373.477.689,00 atau 82,20 % terdapat penurunan realisasi penyerapan anggaran dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 10.392.254.305,00 atau 84,44 %.

Penggunaan Belanja oprasi pada Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Nganjuk di uraikan pada tabel 3.6.4.1 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan, Evaluasi dan Rekomendasi

Apabila dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi. Untuk mengetahui persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan (total) anggaran pada Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

**Tabel : 3.3**  
**Alokasi Anggaran Per Sasaran Pembangunan Tahun 2022**

| No                             | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja                                    | Anggaran              | Realisasi Anggaran   | % Capaian    |
|--------------------------------|--|--|-----------------------|----------------------|--------------|
| 1                              | 2  | 3  | 4                     | 5                    | 6            |
| 1.                             | Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis | 1. % Kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD             | 737,454,189           | 658,244,565          | 89,26        |
|                                |  | 2. % Capaian sasaran Pembangunan daerah $\geq$ 80 %. | 8,261,561,870         | 6,324,057,330        | 76,55        |
| <b>Jumlah Sasaran I</b>        |  |  | <b>8,999,016,059</b>  | <b>6,982,301,895</b> | <b>77,59</b> |
| 2.                             | Meningkatnya efektifitas penelitian dan pengembangan                     | % pemanfaatan hasil kelitbangan                      | 1,187,419,050         | 971,565,074          | 81,82        |
| <b>Jumlah Sasaran II</b>       |  |  | <b>1,187,419,050</b>  | <b>971,565,074</b>   | <b>81,82</b> |
| <b>Jumlah Sasaran I dan II</b> |  |  | <b>10,186,435,109</b> | <b>8,373,477,689</b> | <b>82,20</b> |

LKjIP Bappeda Kab. Nganjuk 2023

## 2.2.2 Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Penyajian data pencapaian kinerja dan anggaran adalah untuk membandingkan antara hasil persentase fisik kegiatan dengan anggaran program kegiatan, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel : 3.16**  
**Pencapaian Kinerja Dan Anggaran Tahun 2023**

| Sasaran  | Indikator  | Kinerja |           |         | Program   | Anggaran      |               |         |
|--|--|---------|-----------|---------|---|---------------|---------------|---------|
|  |  | Target  | Realisasi | Capaian |   | Alokasi       | Realisasi     | Capaian |
| <b>Sasaran 1</b>   |  |         |           |         |   |               |               |         |
| Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis | 1. % Kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD             | 100%    | 94,90%    | 94,90%  | 1. Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah ;       | 918,835,250   | 896,839,374   | 97,61   |
|  | 2. % Capaian sasaran Pembangunan daerah $\geq$ 80 %. | 100%    |           |         | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota        | 7,342,726,620 | 5,427,217,956 | 73,91   |
|  |  |         |           |         | 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 737,454,189   | 658,244,565   | 89,26   |
| <b>Sasaran 2</b>   |  |         |           |         |   |               |               |         |
| Meningkatnya efektifitas penelitian dan pengembangan                     | % pemanfaatan hasil kelitbangan                      | 100%    | 100%      | 100%    | Program Penelitian, Pengembangan dan Pengembangan Daerah              | 1,187,419,050 | 971,565,074   | 81,82   |

LKjIP Bappeda Kab. Nganjuk 2023



## **BAB IV** **Penutup**

Pelaksanaan kegiatan Bappeda Kabupaten Nganjuk pada Tahun Anggaran 2023 secara umum telah menyelesaikan program dan kegiatan yang ditetapkan dengan nilai capaian kinerja Sasaran I **“Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis”** sebesar **89,47%** dan Sasaran II **“Meningkatnya efektifitas penelitian dan pengembangan”** sebesar **100 %**.

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut secara umum dapat diatasi dengan dukungan potensi dan kemampuan organisasi yang ada. Capaian kinerja sasaran yang dicapai tetap harus selalu dievaluasi karena seiring dengan berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi akan berbeda. Untuk itu sikap taktis dan responsive harus terus menerus dikembangkan. Dukungan masyarakat dan kerjasama instansi terkait juga harus bisa dimanfaatkan guna memacu kinerja instansi.

Peningkatan Kinerja Organisasi dalam penyusunan Dokumen Perencanaan akan terus dilaksanakan melalui Menyusun isu aktual pembangunan daerah, Menyelaraskan proses teknokratik, politis, topdown dan bottom up serta partisipatif dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah, Menyempurnakan penjenjangan kinerja sehingga tercipta hubungan kausalitas antar kinerja secara berjenjang (antara kepala daerah dengan kepala perangkat daerah), Melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis elektronik.

Kami berharap Laporan Kinerja Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Kabupaten Nganjuk, dan semoga bermanfaat untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- A. Matriks Renstra
- B. IKU
- C. Perjanjian Kinerja
- D. Ringkasan Pengukuran Kinerja

**RINGKASAN PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)  
BAPPEDA KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2023**

| Sasaran   | Indikator Sasaran                                 | Target (%)                | Realisasi (%) | Pencapaian (%) | Keterangan |
|---|---|---------------------------|---------------|----------------|------------|
| Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis. | % Kesesuaian muatan RPJMD dengan RKPD             | 100                       | 95,60         | 95,60          |            |
|   | % Capaian sasaran Pembangunan daerah $\geq$ 80 %. | 100                       | 83,33         | 83,33          |            |
| <b>Capaian Sasaran I</b>  |   |                           |               |                |            |
| Terwujudnya penelitian dan pengembangan yang implementatif                | % pemanfaatan hasil kelitbangan                   | 100                       | 100           | 100            |            |
|   |   | <b>Capaian Sasaran II</b> |               |                |            |
|   |   |                           |               | 100            |            |

Nganjuk, Januari 2024  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN NGANJUK



**Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640311 199003 1 012





| Tujuan | Kategori Sasaran | Indikator Sasaran  | Kode            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target Kinerja Program dan Kerangka Pelembagaan |           |            |                | Unit Kerja OPD Penanggung jawab | Lokasi        |            |                |             |
|--------|------------------|--|-----------------|--|---|---|-----------|------------|----------------|---------------------------------|---------------|------------|----------------|-------------|
|        |                  |  |                 |  |   | Tahun 2021                                      |           | Tahun 2022 |                |                                 |               | Tahun 2023 |                |             |
|        |                  |  |                 |  |   | Target  | Rp. (000) | Target     | Rp. (000)      |                                 |               | Target     | Rp. (000)      | Target      |
|        |                  |  | 5.01.02.2.04    | 4. Implementasi Sistem Informasi Pemertintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah           | Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemertintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah  |   |           | 2          | 200.000.000    | 2                               | 200.000.000   |            |                |             |
|        |                  |  | 5.01.02.2.04.01 | 1) Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemertintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemertintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola  |   |           | 2          | 200.000.000    | 2                               | 200.000.000   |            |                |             |
|        |                  | 2. % Capaian kinerja sasaran RKJMD dengan predikat "tercapai" / ≥ 80 % | 5.01.01         | B Program Fasilitasi dan Pemertintahan Daerah Kabupaten/Kota                                 | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |   |           | 85,75      | 10.914.122.000 | 85                              | 7.468.500.000 | 87         | 8.034.000.000  | Sekretariat |
|        |                  |  | 5.01.01.2.01    | 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | 1. % Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun  | 100%  |           |            | 6.595.000      |                                 |               | 100%       | 6.595.000      |             |
|        |                  |  |                 |  | 2. % Dokumen Anggaran Perangkat Daerah yang disusun   | 100%  |           |            |                |                                 |               | 100%       |                |             |
|        |                  |  |                 |  | 3. % Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun   | 100%  |           |            | 16.599.000     |                                 |               | 100%       | 16.599.000     |             |
|        |                  |  |                 |  | 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |   |           | 3          | 15.000.000     | 3                               | 36.000.000    | 3          | 36.000.000     |             |
|        |                  |  |                 |  | 2. Jumlah dokumen Anggaran Perangkat Daerah yang disusun  |   |           | 2          | 32.000.000     | 4                               | 37.000.000    | 4          | 37.000.000     |             |
|        |                  |  |                 |  | 3. Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun  |   |           | 7          | 35.000.000     | 7                               | 40.000.000    | 7          | 40.000.000     |             |
|        |                  |  | 5.01.01.2.01.01 | 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 0   |           | 3          | 15.000.000     | 3                               | 36.000.000    | 6          | 51.000.000     |             |
|        |                  |  |                 |  | 2. Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang disusun  | 1   |           | 0          | 6.595.000      | 0                               |               | 1          | 6.595.000      |             |
|        |                  |  |                 |  | 3. Dokumen Renja Perangkat Daerah yang disusun  | 1   |           | 1          |                |                                 |               | 2          |                |             |
|        |                  |  |                 |  | 4. Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang disusun  | 1   |           | 1          |                |                                 |               | 2          |                |             |
|        |                  |  | 5.01.01.2.01.02 | 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 0   |           | 1          | 16.000.000     | 1                               | 16.000.000    | 2          | 32.000.000     |             |
|        |                  |  | 5.01.01.2.01.03 | 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                      | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 0   |           | 1          | 16.000.000     | 1                               | 16.000.000    | 2          | 32.000.000     |             |
|        |                  |  | 5.01.01.2.01.04 | 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | 0   |           | 0          |                | 1                               | 2.500.000     | 1          | 2.500.000      |             |
|        |                  |  | 5.01.01.2.01.05 | 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD  | 0   |           | 0          |                | 1                               | 2.500.000     | 1          | 2.500.000      |             |
|        |                  |  | 5.01.01.2.01.06 | 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD     | 1. Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang disusun  | 0   |           | 0          |                | 0                               |               | 0          |                |             |
|        |                  |  |                 |  | 2. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4   |           | 4          | 16.599.000     | 4                               | 15.000.000    | 12         | 46.599.000     |             |
|        |                  |  | 5.01.01.2.01.07 | 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1. Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang disusun  | 1   |           |            |                |                                 |               | 1          |                |             |
|        |                  |  |                 |  | 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Perangkat Daerah yang disusun   | 1   |           |            |                |                                 |               | 1          |                |             |
|        |                  |  |                 |  | 3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPA) Perangkat Daerah yang disusun   | 1   |           |            |                |                                 |               | 1          |                |             |
|        |                  |  |                 |  | 4. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |   |           | 3          | 20.000.000     | 3                               | 25.000.000    | 6          | 45.000.000     |             |
|        |                  |  | 5.01.01.2.02    | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun  | 53  |           | 51         | 5.437.157.000  | 69                              | 6.041.000.000 | 173        | 18.023.157.000 |             |
|        |                  |  | 5.01.01.2.02.01 | 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah ASN menerima gaji dan tunjangan  | 34  |           |            | 5.430.577.000  |                                 |               | 34         | 5.430.577.000  |             |
|        |                  |  |                 |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |   |           | 43         | 6.000.000.000  | 50                              | 6.800.000.000 | 93         | 12.800.000.000 |             |



| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Tahun 2021 |       |             |       | Tahun 2022  |       |             |       | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD | Unit Kerja OPD Penanggung jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|-----------------|---|--|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|--|---------------------------------|--------|
|        |         |                   |                 |   |  | Target     |       | Rp. (000)   |       | Target      |       | Rp. (000)   |       |  |                                 |        |
|        |         |                   |                 |   |  | Jumlah     | 100%  | Jumlah      | 100%  | Jumlah      | 100%  | Jumlah      | 100%  |  |                                 |        |
|        |         |                   | 5.01.01.2.02.03 | 3) Pelaksanaan Pemenuhan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD           | Jumlah Dokumen Pemenuhan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 0          | 0     | 37.000.000  | 50    | 20.000.000  | 50    | 20.000.000  | 100   | 57.000.000                                     |                                 |        |
|        |         |                   | 5.01.01.2.02.05 | 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD            | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1          | 1     | 4.000.000   | 1     | 5.000.000   | 1     | 5.000.000   | 3     | 12.200.000                                     |                                 |        |
|        |         |                   | 5.01.01.2.02.07 | 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semester SKPD yang disusun   | 18         | 18    | 3.290.000   | 0     | 20.000.000  | 18    | 20.000.000  | 36    | 23.290.000                                     |                                 |        |
|        |         |                   | 5.01.01.2.05    | 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun  | 86         | 86    | 92.490.000  | 86    | 100.000.000 | 86    | 100.000.000 | 258   | 292.490.000                                    |                                 |        |
|        |         |                   | 5.01.01.2.05.02 | 2) Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                   | Jumlah pakan dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan  | 43         | 43    | 17.490.000  | 43    | 25.000.000  | 50    | 25.000.000  | 50    | 25.000.000                                     |                                 |        |
|        |         |                   | 5.01.01.2.05.09 | 9) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                | 43         | 43    | 75.000.000  | 43    | 75.000.000  | 50    | 75.000.000  | 50    | 225.000.000                                    |                                 |        |
|        |         |                   | 5.01.01.2.06    | 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     | Terselenggaranya Administrasi Umum   | 100%       | 100%  | 303.026.100 | 7     | 348.000.000 | 7     | 363.500.000 | 7     | 701.500.000                                    |                                 |        |
|        |         |                   | 5.01.01.2.06.01 | 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor       | Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Sub Bagian Umum yang Dilaksanakan  | 10         | 10    | 2.999.600   | 10    | 3.000.000   | 20    | 3.000.000   | 20    | 6.000.000                                      |                                 |        |
|        |         |                   | 5.01.01.2.06.04 | 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                       | Jumlah Paket Barang Logistik Kantor yang Disediakan  | 45         | 45    | 72.100.000  | 45    | 72.100.000  | 50    | 75.000.000  | 100   | 160.000.000                                    |                                 |        |
|        |         |                   | 5.01.01.2.06.05 | 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                | Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia  | 15000      | 15000 | 45.675.000  | 15000 | 45.000.000  | 15000 | 45.000.000  | 30000 | 90.000.000                                     |                                 |        |
|        |         |                   | 5.01.01.2.06.06 | 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan  | 4          | 4     | 6.000.000   | 4     | 7.000.000   | 8     | 7.000.000   | 8     | 14.000.000                                     |                                 |        |
|        |         |                   | 5.01.01.2.06.08 | 8) Fasilitas Kunjungan Tamu   | Fasilitas Kunjungan Tamu   | 12         | 12    | 2.617.500   | 12    | 3.000.000   | 12    | 3.500.000   | 24    | 6.500.000                                      |                                 |        |
|        |         |                   | 5.01.01.2.06.09 | 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan  | 20         | 20    | 173.634.000 | 20    | 173.634.000 | 20    | 173.634.000 | 20    | 173.634.000                                    |                                 |        |
|        |         |                   | 5.01.01.2.06.10 | 10) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                 | Jumlah arsip dinamis pada SKPD yang dikelola   | 0          | 0     | -           | 0     | 175.000.000 | 20    | 180.000.000 | 20    | 355.000.000                                    |                                 |        |
|        |         |                   | 5.01.01.2.07    | 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     | Jumlah barang milik daerah SKPD yang diadakan  | 0          | 0     | -           | 107   | 195.000.000 | 16    | 185.000.000 | 123   | 350.000.000                                    |                                 |        |
|        |         |                   | 5.01.01.2.07.01 | 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | 0          | 0     | -           | 1     | 35.000.000  | 1     | 35.000.000  | 1     | 35.000.000                                     |                                 |        |
|        |         |                   | 5.01.01.2.07.05 | 5) Pengadaan Mebel  | Jumlah mebel yang diadakan   | 0          | 0     | -           | 0     | 100.000.000 | 0     | -           | 0     | -  |                                 |        |
|        |         |                   | 5.01.01.2.07.06 | 6) Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya                               | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan   | 0          | 0     | -           | 0     | -           | 0     | -           | 0     | -  |                                 |        |
|        |         |                   | 5.01.01.2.07.08 | 8) Pengadaan Asestak Berwujud   | Jumlah aset tak berwujud yang diadakan   | 0          | 0     | -           | 1     | 40.000.000  | 0     | -           | 1     | 40.000.000                                     |                                 |        |



| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Elaborasi Program dan Kegiatan Pelaksanaan |               |            | Kendala Elaborasi pada akhir periode Rencana OPD |            |               | Unit Kerja OPD Pemangku Jawab |                |
|--------|---------|-------------------|-----------------|---|--|---|---------------|------------|--|------------|---------------|-------------------------------|----------------|
|        |         |                   |                 |   |  | Tahun 2021  | Tahun 2022    | Tahun 2023 | Tahun 2021                                       | Tahun 2022 | Tahun 2023    |                               |                |
|        |         |                   |                 |   |  | Target  | Rp. (000)     | Target     | Rp. (000)  | Target     | Rp. (000)     | Target                        | Rp. (000)      |
|        |         |                   |                 | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                  |  |   | 20.000.000    | 5          | 20.000.000                                       | 10         | 40.000.000    |                               |                |
|        |         |                   | 5.01.01.2.08    | 7. Peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Presentase pengendalian jasa Penunjang Perangkat Daerah<br>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia  | 100%  | 194.060.000   | 100%       | 207.500.000                                      | 5          | 207.500.000   | 100%                          | 194.060.000    |
|        |         |                   | 5.01.01.2.08.01 | 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dianggarkan  | 100   | 2.500.000     | 100        | 2.500.000  | 100        | 2.500.000     | 100                           | 2.500.000      |
|        |         |                   | 5.01.01.2.08.02 | 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat<br>Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dicukupi   | 12  | 169.800.000   | 12         | 187.500.000                                      | 5          | 207.500.000   | 12                            | 169.800.000    |
|        |         |                   | 5.01.01.2.08.03 | 3) Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor   | Jumlah jasa perawatan dan perlengkapan kantor yang tersedia  | 0   | -             | 12         | 170.000.000                                      | 12         | 190.000.000   | 12                            | 360.000.000    |
|        |         |                   | 5.01.01.2.08.04 | 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dicukupi   | 12  | 21.760.000    | 12         | 15.000.000                                       | 12         | 15.000.000    | 24                            | 30.000.000     |
|        |         |                   | 5.01.01.2.09    | 5. Pemeliharaan Sarung Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah barang milik daerah SIKPD yang terawat  | 49  | 443.993.050   | 0          | -  | 49         | 443.993.050   | 49                            | 443.993.050    |
|        |         |                   | 5.01.01.2.09.01 | 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah jenis barang milik daerah SIKPD yang dipelihara<br>Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dirawat  | 23  | 165.775.000   | 48         | 515.000.000                                      | 48         | 560.000.000   | 48                            | 1.075.000.000  |
|        |         |                   | 5.01.01.2.09.06 | 6) Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya<br>Jumlah peralatan yang dipelihara<br>Jumlah perlengkapan yang dipelihara                              | 10  | 70.043.050    | 23         | 190.000.000                                      | 23         | 230.000.000   | 23                            | 420.000.000    |
|        |         |                   | 5.01.01.2.09.09 | 9) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara<br>Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dirawat/direhabilitasi   | 15  | 208.175.000   | 25         | 75.000.000                                       | 25         | 80.000.000    | 25                            | 155.000.000    |
|        |         |                   | 5.01.03         | C. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Presentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Baik (Sesuai Prioritas Nasional, Provinsi dan Peraturan yang Ada) | 100%  | 6.519.624.080 | 100%       | 2.165.000.000                                    | 100%       | 1.530.000.000 | 100%                          | 10.214.624.050 |
|        |         |                   | 5.01.03.2.01    | 1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia   | Jumlah urusan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang dikoordinasikan<br>Jumlah Dokumen Perangkat Daerah yang Disaisikan, Dinonaktifkan dan Diselaraskan  | 22  | 769.992.200   | 78         | 665.000.000                                      | 78         | 535.000.000   | 78                            | 555.000.000    |
|        |         |                   | 5.01.03.2.01.01 | 1) Koordinasi Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                                  | Dokumen Review RPJMD yang disusun<br>Jumlah forum perangkat daerah yang dilaksanakan<br>Dokumen Perbaikan RPJMD yang Disusun   | 1   | 435.000.000   | 0          | -  | 0          | -             | 1                             | 435.000.000    |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Kinerja Program dan Kerangka Fundasi |             |            |             |            |             | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab                                   |  |
|--------|---------|-------------------|-----------------|---|--|---|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---|--|
|        |         |                   |                 |   |  | Tahun 2021                                  |             | Tahun 2022 |             | Tahun 2023 |             |   | Kondisi Kinerja pada akhir Periode Rencana OPD |
|        |         |                   |                 |   |  | Target                                      | Rp. (000)   | Target     | Rp. (000)   | Target     | Rp. (000)   |   |  |
|        |         |                   | 5.01.03.2.01.03 | 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RUPD, RPJMD dan RKPD)   | 0   |             | 40         | 35.000.000  | 40         | 35.000.000  |   |  |
|        |         |                   | 5.01.03.2.01.04 | 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       | Jumlah dokumen PD Bidang Pemerintahan yang diselesaikan (siertgas dan harmonis)  | 8   | 84.994.450  |            |             | 8          | 84.994.450  |   |  |
|        |         |                   | 5.01.03.2.01.07 | 7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Renstra/Renja pada Perencanaan Pembangunan  | 66  | 115.000.000 | 66         | 115.000.000 | 66         | 230.000.000 |   |  |
|        |         |                   | 5.01.03.2.01.08 | 8) Koordinasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Manusia   | 1. Jumlah dokumen PD Bidang Pembangunan Manusia yang diselesaikan (siertgas dan harmonis)<br>2. Fasilitasi dan koordinasi bidang pembangunan manusia   | 8   | 249.997.750 |            |             | 8          | 249.997.750 |   |  |
|        |         |                   | 5.01.03.2.02    | 2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)   | Jumlah urusan bidang perkeonomian dan SDA yang ditindaklanjuti   | 10  | 109.999.650 |            |             | 10         | 109.999.650 | Bidang Perencanaan, Perumahan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan |  |
|        |         |                   | 5.01.03.2.02.01 | 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perencanaan (RUPD, RPJMD dan RKPD)                                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Dikoordinir Penyusunannya (RUPD, RPJMD dan RKPD)  | 4   | 350.000.000 | 16         | 395.000.000 | 20         | 745.000.000 |   |  |
|        |         |                   | 5.01.03.2.02.02 | 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan                                   | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perkeonomian  |   |             | 5          | 50.000.000  | 5          | 50.000.000  |   |  |
|        |         |                   | 5.01.03.2.02.03 | 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan         | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perkeonomian  |   |             | 5          | 50.000.000  | 5          | 50.000.000  |   |  |
|        |         |                   | 5.01.03.2.02.04 | 4) Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan                                    | Jumlah Koordinasi Bidang Perkeonomian  | 16  | 49.999.800  | 0          |             | 16         | 49.999.800  |   |  |
|        |         |                   | 5.01.03.2.02.05 | 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang SDA (RUPD, RPJMD dan RKPD)   | Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor/ Bidang Perkeonomian<br>Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perkeonomian<br>Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perkeonomian<br>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/MD pada Bidang Perkeonomian | 2   | 275.000.000 | 2          | 150.000.000 | 4          | 425.000.000 |   |  |



| Tajuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |             | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi      |
|--------|---------|-------------------|-----------------|--|--|---|---------------|------------|-------------|--|---------------------------------|-------------|
|        |         |                   |                 |  |  | Tahun 2021                                    | Tahun 2022    | Tahun 2023 | Tahun 2024  |  |                                 |             |
|        |         |                   |                 |  |  | Rp. (000)                                     | Rp. (000)     | Rp. (000)  | Rp. (000)   | Rp. (000)                                      |                                 |             |
|        |         |                   | 5.01.03.2.02.05 | 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam                           | Jumlah Peringkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA   |   |               | 3          | 40.000.000  | 3  | 40.000.000                      |             |
|        |         |                   | 5.01.03.2.02.07 | 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Peringkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA   |   |               | 3          | 30.000.000  | 3  | 30.000.000                      |             |
|        |         |                   | 5.01.03.2.02.08 | 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                             | - Jumlah Koordinasi Bidang SDA<br>- Jumlah Dokumen Perencanaan Sektorl Bidang SDA<br>- Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang dan SDA<br>- Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang SDA<br>- Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA   | 16  | 59.999.850    | 0          | -           | 16   | 59.999.850                      |             |
|        |         |                   | 5.01.03.2.03    | 3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan   | Jumlah urusan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dikordinasikan   | 6   | 743.827.200   | 6          | -           | 6  | 743.827.200                     |             |
|        |         |                   | 5.01.03.2.03.01 | 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)               | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  |   |               | 2          | 75.000.000  | 2  | 75.000.000                      | 150.000.000 |
|        |         |                   | 5.01.03.2.03.02 | 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Infrastruktur                              | Jumlah Peringkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur   | 4   | 1.150.000.000 | 10         | 600.000.000 | 14   | 1.750.000.000                   |             |
|        |         |                   | 5.01.03.2.03.03 | 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Infrastruktur    | Jumlah Peringkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur   |   |               | 3          | 50.000.000  | 3  | 50.000.000                      |             |
|        |         |                   | 5.01.03.2.03.04 | 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                   | - Jumlah Koordinasi Bidang Infrastruktur<br>- Jumlah Dokumen Perencanaan Sektorl Bidang Infrastruktur<br>- Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur<br>- Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur<br>- Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | 1   | 288.827.200   |            |             | 1  | 488.827.400                     |             |
|        |         |                   | 5.01.03.2.03.05 | 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                 | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  |   |               |            |             |  |                                 |             |
|        |         |                   | 5.01.03.2.03.06 | 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Kewilayahan                                | Jumlah Peringkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan   |   |               | 2          | 50.000.000  | 2  | 50.000.000                      |             |
|        |         |                   | 5.01.03.2.03.07 | 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Kewilayahan      | Jumlah Peringkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan   |   |               | 2          | 50.000.000  | 2  | 50.000.000                      |             |
|        |         |                   | 5.01.03.2.03.08 | 4) Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                                 | - Jumlah Koordinasi Bidang Kewilayahan<br>- Jumlah Dokumen Perencanaan Sektorl Bidang Kewilayahan<br>- Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Kewilayahan   | 1   | 455.000.000   |            |             | 1  | 555.000.000                     |             |



| Tujuan  | Batasan  | Indikator Basaran                 | Kode            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan              | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |         | Kondisi Kinerja pada akhir periode Kemeteri OPD | Unit Kerja OPD Pemangku Javel |                                    |
|---|--|-----------------------------------|-----------------|---|--|---|---------------|------------|---------------|---------|---|-------------------------------|------------------------------------|
|   |  |                                   |                 |   |  | Tahun 2021                                    |               | Tahun 2022 |               | Tahun 5 |   |                               |                                    |
|   |  |                                   |                 |   |  | TARGET  | Rp. (000)     | TARGET     | Rp. (000)     | TARGET  |   |                               | Rp. (000)                          |
| 2. Terwujudnya Penelitian dan Pengembangan Daerah yang inovatif | 2. Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan yang implementatif | 1. % Pemanfaatan hasil Kolaborasi | 5.05.02.2.01.02 | D. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | - Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan | 1   |               | 2          | 750.000.000   |         |   | 1                             | Bidang Penelitian dan Pengembangan |
|   |  |                                   |                 |   |  | 0   |               | 2          | 100.000.000   | 4       | 850.000.000                                     |                               |                                    |
|   |  |                                   |                 |   |  | 100%  | 4.895.805.000 | 100%       | 4.895.805.000 | 100%    | 4.895.805.000                                   |                               |                                    |
|   |  |                                   |                 |   |  |   |               | 100%       | 485.000.000   | 100%    | 400.000.000                                     |                               |                                    |
|   |  |                                   |                 |   |  |   |               | 3          | 250.000.000   | 1       | 150.000.000                                     |                               |                                    |
|   |  |                                   |                 |   |  |   |               | 3          | 325.000.000   | 1       | 150.000.000                                     |                               |                                    |
|   |  |                                   |                 |   |  |   |               | 4          | 1.190.000.000 | 3       | 750.000.000                                     |                               |                                    |
|   |  |                                   |                 |   |  |   |               | 2          | 400.000.000   | 1       | 200.000.000                                     |                               |                                    |
|   |  |                                   |                 |   |  |   |               | 1          | 150.000.000   | 1       | 400.000.000                                     |                               |                                    |
|   |  |                                   |                 |   |  |   |               | 0          | 640.000.000   | 1       | 150.000.000                                     |                               |                                    |
|   |  | 3                                 | 4.895.805.000   | 3   | 4.895.805.000  | 3   | 4.895.805.000 |            |               |         |   |                               |                                    |
|   |  | 0                                 |                 | 12  | 4.110.000.000  | 11  | 4.050.000.000 | 23         | 8.160.000.000 |         |   |                               |                                    |
|   |  | 0                                 |                 | 2   | 1.500.000.000  | 2   | 1.300.000.000 | 4          | 2.800.000.000 |         |   |                               |                                    |
|   |  | 1                                 | 400.000.000     | 0   |  | 1   | 250.000.000   | 2          | 650.000.000   |         |   |                               |                                    |
|   |  | 0                                 |                 | 0   |  | 0   |               | 0          |               |         |   |                               |                                    |
|   |  | 0                                 |                 | 0   |  | 0   |               | 0          |               |         |   |                               |                                    |
|   |  | 0                                 |                 | 0   |  | 0   |               | 0          |               |         |   |                               |                                    |
|   |  | 0                                 |                 | 0   |  | 0   |               | 0          |               |         |   |                               |                                    |
|   |  | 3                                 | 425.000.000     | 3   | 425.000.000  | 3   | 425.000.000   | 3          | 425.000.000   |         |   |                               |                                    |
|   |  |                                   |                 | 2   | 400.000.000  | 2   | 600.000.000   | 4          | 900.000.000   |         |   |                               |                                    |
|   |  | 3                                 | 4.070.805.000   | 0   |  | 0   |               | 3          | 4.070.805.000 |         |   |                               |                                    |
|   |  | 1                                 |                 | 0   |  | 0   |               | 1          |               |         |   |                               |                                    |

| Tujuan | Batasan | Indikator Sasaran | Kode            | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan |              |              |               |              | Unit Kerja OPD Penanggung Jawab | Lokasi |           |
|--------|---------|-------------------|-----------------|---|---|---|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------|--------|-----------|
|        |         |                   |                 |   |   | Tahun 2021                                      | Tahun 4 2022 | Tahun 5 2023 | Tahun 5 2023  | Tahun 5 2023 |                                 |        |           |
|        |         |                   |                 |   |   | Target  | Rp. (000)    | Target       | Rp. (000)     | Target       | Rp. (000)                       | Target | Rp. (000) |
|        |         |                   | 5.05.02.2.03.11 | 11) Penelitian dan Pengembangan (Rumahnya) dan Kawasan Permukiman   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum   | 0   | 210.000.000  | 2            | 1.000.000.000 | 2            | 1.000.000.000                   |        |           |
|        |         |                   | 5.05.02.2.04    | 4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi   | Jumlah Inovasi dan teknologi daerah yang dikembangkan   | 0   | 485.000.000  | 5            | 400.000.000   | 10           | 885.000.000                     |        |           |
|        |         |                   | 5.05.02.2.04.01 | 1) Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi  | Lomba Kreativitas Inovasi dan teknologi dalam rangka hari jadi Kabupaten Ngablak  | 0   |              |              |               | 0            |                                 |        |           |
|        |         |                   | 5.05.02.2.04.02 | 2) Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi  | 1   | 210.000.000  | 1            | 150.000.000   | 2            | 360.000.000                     |        |           |
|        |         |                   |                 |   | Fundasi Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi                          | 0   |              |              |               | 5            | 125.000.000                     |        |           |
|        |         |                   | 5.05.02.2.04.03 | 3) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Daerah Yang Bersifat Inovatif                                | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 0   |              |              |               | 0            |                                 |        |           |
|        |         |                   | 5.05.02.2.04.04 | 4) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kaitimbangan  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif                   | 0   |              |              |               | 0            |                                 |        |           |
|        |         |                   | 5.05.02.2.04.05 | 5) Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Hasil Kaitimbangan yang dilaksanakan  | 0   |              |              |               | 0            |                                 |        |           |
|        |         |                   |                 |   | Jumlah Laporan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kaitimbangan  | 4   | 100.000.000  | 1            | 100.000.000   | 5            | 200.000.000                     |        |           |
|        |         |                   |                 |   | Jumlah Fasilitas pendaharan legalitas HAKI  | 0   |              |              |               | 1            |                                 |        |           |
|        |         |                   |                 |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual   | 0   | 50.000.000   | 1            | 50.000.000    | 11           | 100.000.000                     |        |           |







PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Jend. Basuki Rahmad No.1 Telp. (0358) 321233

Telp./Fax:(0358) 321233

Email : bappeda@nganjukkab.go.id

NGANJUK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si.

Jabatan : KEPALA BAPPEDA KABUPATEN NGANJUK.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr.Drs. H. MARHAEN DJUMADI, S.E, S.H, M.M, M.BA.

Jabatan : Plt. BUPATI NGANJUK.

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk, Januari 2023

**PIHAK KEDUA**  
Plt. BUPATI NGANJUK

Dr.Drs. H. MARHAEN DJUMADI, S.E, S.H, M.M, M.BA.

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala BAPPEDA  
Kabupaten Nganjuk

Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640311 199303 1 012

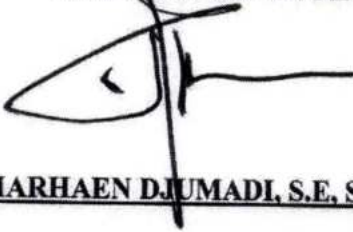


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja  | Target |
|-----|--|--|--------|
| 1.  | Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah yang integratif dan sinergis | Persentase kesesuaian muatan RKPD dan RPJMD              | 100 %  |
|     |  | Persentase capaian sasaran pembangunan daerah $\geq$ 80% | 100 %  |
| 2.  | Meningkatnya penelitian dan pengembangan yang implementatif              | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan                 | 100 %  |

| No | Program Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023                       |           | Anggaran                |
|----|--|-----------|-------------------------|
| 1  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | Rp        | 7.620.921.760,-         |
| 2  | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  | Rp        | 1.083.356.550,-         |
| 3  | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Rp        | 798.403.189,-           |
| 4  | PROGRAM PRNRLITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                         | Rp        | 2.141.315.050,-         |
|    | <b>JUMLAH</b>  | <b>Rp</b> | <b>11.643.996.549,-</b> |

**PIHAK KEDUA**  
Plt. BUPATI NGANJUK



Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, S.E., S.H., M.M., M.B.A.

Nganjuk, Januari 2023

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala BAPPEDA  
Kabupaten Nganjuk



Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640311 199303 1 012

| DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN<br>SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH   |                                      |   |                           | DPPA<br>REKAPITULASI<br>SKPD  |                           |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------|
| Kab. Nganjuk<br>Tahun Anggaran 2023   |                                      |   |                           |   |                           |
| Nomor DPA : DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023  |                                      |   |                           |   |                           |
| Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  |                                      |   |                           |   |                           |
| Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah<br>Satuan Kerja Perangkat Daerah |                                      |   |                           |   |                           |
| Kode Rekening   | Uraian                               | Sebelum Perubahan                       |                           | Setelah Perubahan   |                           |
|   |                                      | Jumlah (Rp)                             |                           | Jumlah (Rp)   |                           |
| 4   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>             |   |                           |   |                           |
|   | <b>Jumlah Pendapatan</b>             |   | <b>Rp0</b>                |   | <b>Rp0</b>                |
| 5   | <b>BELANJA DAERAH</b>                |   |                           |   |                           |
| 5 1   | <b>BELANJA OPERASI</b>               |   | <b>Rp11.642.796.549</b>   |   | <b>Rp9.745.745.109</b>    |
| 5 1 01  | Belanja Pegawai                      |   | Rp6.637.355.000           |   | Rp5.484.021.000           |
| 5 1 02  | Belanja Barang dan Jasa              |   | Rp5.005.441.549           |   | Rp4.261.724.109           |
| 5 2   | <b>BELANJA MODAL</b>                 |   | <b>Rp1.200.000</b>        |   | <b>Rp440.690.000</b>      |
| 5 2 02  | Belanja Modal Peralatan dan Mesin    |   | Rp1.200.000               |   | Rp440.690.000             |
|   | <b>Jumlah Belanja</b>                |   | <b>Rp11.643.996.549</b>   |   | <b>Rp10.186.435.109</b>   |
|   | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>       |   | <b>(Rp11.643.996.549)</b> |   | <b>(Rp10.186.435.109)</b> |
| 6   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>             |   |                           |   |                           |
|   | <b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>  |   | <b>Rp0</b>                |   | <b>Rp0</b>                |
|   | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b> |   | <b>Rp0</b>                |   | <b>Rp0</b>                |
|   | <b>Pembiayaan Neto</b>               |   | <b>Rp0</b>                |   | <b>Rp0</b>                |
| <b>Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan</b>   |                                      | <b>Rencana Penarikan Dana per Bulan</b> |                           | Nganjuk, tanggal 24 Oktober 2023<br>Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah<br><br><u>Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si</u><br>NIP: 196403111993031012<br><br>Mengesahkan,<br>PPKD<br><br><u>KARTIMAH, SE, M.Si</u><br>NIP: 196405051987032012 |                           |
| Januari   | Rp0                                  | Januari                                 | Rp566.127.380             |   |                           |
| Februari  | Rp0                                  | Februari                                | Rp905.952.226             |   |                           |
| Maret   | Rp0                                  | Maret                                   | Rp586.716.118             |   |                           |
| April   | Rp0                                  | April                                   | Rp1.250.440.907           |   |                           |
| Mei   | Rp0                                  | Mei                                     | Rp1.089.111.481           |   |                           |
| Juni  | Rp0                                  | Juni                                    | Rp605.388.645             |   |                           |
| Juli  | Rp0                                  | Juli                                    | Rp675.149.019             |   |                           |
| Agustus   | Rp0                                  | Agustus                                 | Rp713.957.066             |   |                           |
| September   | Rp0                                  | September                               | Rp406.080.583             |   |                           |
| Oktober   | Rp0                                  | Oktober                                 | Rp1.250.508.080           |   |                           |
| November  | Rp0                                  | November                                | Rp1.272.182.838           |   |                           |
| Desember  | Rp0                                  | Desember                                | Rp864.820.766             |   |                           |
| Jumlah  | Rp0                                  | Jumlah                                  | Rp10.186.435.109          |   |                           |
| <b>Tim Anggaran Pemerintah Daerah</b>   |                                      |   |                           |   |                           |
| No.   | Nama                                 | NIP                                     | Jabatan                   | Tanda Tangan  |                           |
| 1.  | Drs. NUR SOLEKAN, M.Si               | 196612271986021001                      | Ketua                     |   |                           |
| 2.  | Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si             | 196403111993031012                      | Wakil Ketua               |   |                           |
| 3.  | KARTIMAH, SE, M.Si                   | 196405051987032012                      | Sekretaris                |   |                           |



Evaluasi Terhadap Hasil Renja Peringkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota  
Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk  
Periode Pelaksanaan Tribulan IV Tahun 2023

| Indikator  |  | TARGET |
|--|--|--------|
| 1. Persentase (%) Kesesuaian Muatan antara RKPD dengan RPJMD |  | 100%   |
| 2. Persentase (%) Capaian Sasaran Pembangunan Daerah 280%    |  | 100%   |
| 3. Persentase (%) Pemanfaatan Hasil Kelibangan               |  | 100%   |

Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

| NO              | Sasaran | Nomor | Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan   | Target RPJMD pada Tahun 2018 sd Tahun 2023 |                | Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu |               | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan |               | Realisasi Kinerja pada Tribulan |             | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 |                 | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD RPJMD sd Tahun 2023 |           |                |      |
|-----------------|---------|-------|---|--|--|----------------|---|---------------|---|---------------|---------------------------------|-------------|--|-----------------|---|-----------|----------------|------|
|                 |         |       |   |  | K  | Rp             | K   | Rp            | K   | Rp            | K                               | Rp          | K  | Rp              | K   | Rp        | K              | Rp   |
|                 |         | (1)   | (2)   | (3)  | (4)  | (5)            | (6)   | (7)           | (8)   | (9)           | (10)                            | (11)        | (12)   | (13-9+10+11+12) | (14-12,8x100%)  | (15-7+13) | (16-15/6x100%) |      |
| 5               |         |       | UNSUB PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |  |  |                |   |               |   |               |                                 |             |  |                 |   |           |                |      |
| 5.01            |         |       | PERENCANAAN   |  |  |                |   |               |   |               |                                 |             |  |                 |   |           |                |      |
| 5.01.01         |         |       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |  |  |                |   |               |   |               |                                 |             |  |                 |   |           |                |      |
| 5.01.01.2.01    |         |       | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD yang disusun  | 87   | 15.532.599,000 | 206.599,000   | 2.704.156,403 | 85  | 8.453.280,610 | 88                              | 895.386,329 | 2.599.400,549  | 5.659.756,838   | 104%  | 88        | 8.363.913,241  | 101% |
| 5.01.01.2.01.01 |         |       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 6  | 51.000,000     | 206.599,000   | 52.946,000    | 12  | 111.436,000   | 12                              | 1.903,000   | 15.174,000   | 29.720,000      | 100%  | 33        | 82.666,000     | 118% |
| 5.01.01.2.01.02 |         |       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 2  | 32.000,000     | 32.000,000  | 10.042,000    | 1   | 13.726,000    | 1                               |             |  |                 | 0%  | 2         | 10.042,000     | 100% |
| 5.01.01.2.01.03 |         |       | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                     | 2  | 32.000,000     | 32.000,000  | 13.726,000    | 1   | 13.726,000    | 1                               |             |  |                 | 0%  | 2         | 0              | 100% |
| 5.01.01.2.01.06 |         |       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Iktisar Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Iktisar Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD | 12   | 46.599,000     | 46.599,000  | 17.814,000    | 4   | 17.814,000    | 1                               |             | 7.644,000  |                 |   |           |                | 40%  |
| 5.01.01.2.01.07 |         |       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 6  | 45.000,000     | 45.000,000  | 29.097,000    | 3   | 27.613,000    | 3                               |             |  | 10.897,000      | 100%  | 9         | 39.994,000     | 150% |
| 5.01.01.2.02    |         |       | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun   | 155  | 12.589.500,000 | 12.589.500,000  | 2.101.533,343 | 56  | 6.579.960,000 | 34                              | 450.850,000 | 1.516.364,774  | 4.172.756,330   | 55%   | 132       | 6.274.291,673  | 85%  |
| 5.01.01.2.02.01 |         |       | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 43   | 12.500.000,000 | 12.500.000,000  | 4.489.867,949 | 43  | 6.500.000,000 | 31                              | 447.410,090 | 1.512.314,774  | 4.145.620,330   | 70%   | 43        | 8.635.488,279  | 100% |
| 5.01.01.2.02.02 |         |       | Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 24   | 77.000,000     | 77.000,000  |               | 12  |               |                                 |             |  |                 | 0%  | 12        | 0              | 50%  |
| 5.01.01.2.02.05 |         |       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                       | 2  | 12.500,000     | 12.500,000  | 3.440,000     | 1   | 9.770,000     | 1                               |             | 4.050,000  |                 |   | 3         | 10.930,000     | 87%  |
| 5.01.01.2.02.07 |         |       | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Badan/Trivulanan/Semesteran SKPD  | Jumlah Laporan Keuangan Badan/Trivulanan/Semesteran SKPD yang disusun  | 18   | 3.290,000      | 3.290,000   | 5.666,800     | 18  | 20.190,000    | 2                               |             | 13.025,000   |                 |   | 30        | 25.314,800     | 76%  |
| 5.01.01.2.05    |         |       | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun  | 186  | 275.000,000    | 275.000,000   | 5.666,800     | 100   | 152.284,000   |                                 |             |  |                 |   | 86        | 5.666,800      | 46%  |
| 5.01.01.2.05.02 |         |       | Pengadaan Pakaian Dinas Besera Atribut Kelengkapannya   | Jumlah Paket Pakaian Dinas Besera Atribut Kelengkapannya   | 93   | 50.000,000     | 50.000,000  |               | 50  | 24.800,000    |                                 |             |  |                 | 0   | 0         | 0%             |      |
| 5.01.01.2.05.09 |         |       | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 93   | 225.000,000    | 225.000,000   | 404.699,123   | 43  | 107.484,000   |                                 |             |  |                 | 0   | 43        | 404.699,123    | 180% |
| 5.01.01.2.06    |         |       | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Sub Bagian Umum yang Dilaksanakan  | 7  | 701.500,000    | 701.500,000   | 9.147,000     | 7   | 392.105,160   | 7                               | 17.957,300  | 51.325,763   | 444.195,448     | 100%  | 7         | 453.342,448    | 65%  |



| NO              | Saaran | Nomor           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja Program/Kegiatan   | Target RPJMD pada Tahun 2019 s/d Tahun 2023 |               |      | Realisasi Capaian Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu |      |             | Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan |             |      | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 |      |             | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD di Tahun 2023 |             |      | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran RPJMD di Tahun 2023 |      |               |      |             |      |     |
|-----------------|--------|-----------------|---|--|---|---------------|------|---|------|-------------|---|-------------|------|--|------|-------------|--|-------------|------|--|------|---------------|------|-------------|------|-----|
|                 |        |                 |   |  | K   | Rp            | K    | Rp  | K    | Rp          | K   | Rp          | K    | Rp   | K    | Rp          | K  | Rp          | K    | Rp   | K    | Rp            | K    | Rp          | K    | Rp  |
|                 |        |                 |   |  |   |               |      |   |      |             |   |             |      |  |      |             |  |             |      |  |      |               |      |             |      |     |
| 1               |        | 5 01 01 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 20  | 6.000.000     | 10   | 2.998.360   | 10   | 104.159.000 | 10  | 666.000     | 2    | 515.500  | 3    | 4.770.450   | 10   | 5.951.950   | 100% | 199%   | 20   | 110.110.950   | 100% | 1835%       |      |     |
| 2               |        | 5 01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 100   | 150.000.000   | 50   | 130.240.000   | 50   | 45.656.400  | 50  | 13.131.700  | 20   | 17.013.150   |      | 67.946.000  | 50   | 105.420.150 | 100% | 81%  | 100  | 151.076.550   | 100% | 101%        |      |     |
| 3               |        | 5 01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cankan dan Pengadaan  | Jumlah Paket Barang Cankan dan Pengadaan yang Disediakan   | 3000  | 90.000.000    | 1500 | 47.205.800  | 1500 | 5.264.000   | 1500  | 6.190.000   | 200  | 3.991.000  | 300  | 34.192.500  | 1500   | 44.373.500  | 100% | 94%  | 3000 | 49.637.500    | 100% | 55%         |      |     |
| 4               |        | 5 01 01 2.06 06 | Penyediaan Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-undangan  | Jumlah Dokumen Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                           | 8   | 14.000.000    | 4    | 6.900.000   | 4    | 24.361.725  | 4   | 24.361.725  | -    | -  | -    | -           | 0  | -           | 0%   | 0%   | 4    | 24.361.725    | 50%  | 174%        |      |     |
| 5               |        | 5 01 01 2.06 08 | Facilities Kunjungan Tamu   | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu  | 24  | 6.500.000     | 12   | 24.625.000  | 12   | 223.440.298 | 12  | 6.135.950   | 2    | 4.317.500  | 4    | 17.570.995  | 12   | 28.024.445  | 100% | 114%   | 24   | 251.464.743   | 100% | 3869%       |      |     |
| 6               |        | 5 01 01 2.06 09 | Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 40  | 355.000.000   | 20   | 180.136.000   | 20   | 10.628.000  | 20  | 29.233.834  | 15   | 25.688.613   | 15   | 194.874.956 | 50   | 260.425.403 | 100% | 145%   | 70   | 271.053.403   | 175% | 76%         |      |     |
| 7               |        | 5 01 01 2.06 10 | Penunjabahan Arsip Dinamis pada SKPD  | Jumlah Dokumen Penunjabahan Arsip Dinamis pada SKPD  | 6000  | 80.000.000    | 3000 | 121.646.010   | 3000 | 121.646.010 | 3000  | 121.646.010 |      |  |      | 0           | -  | 0           | 0%   | 0%   | 3000 | 121.646.010   | 50%  | 152%        |      |     |
| 5               |        | 5 01 01 2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan   | Jumlah barang milik daerah SKPD yang diadakan  | 120   | 290.000.000   | 120  | 439.490.000   | 120  | 121.646.010 | 120   | 439.490.000 | -    | -  | 14   | 417.940.000 | 14   | 417.940.000 | 100% | 95%  | 134  | 539.586.010   | 112% | 186%        |      |     |
| 1               |        | 5 01 01 2.07 05 | Pengadaan Mebel   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 100   | 190.000.000   |      |   |      |             |   |             |      |  |      | 0           | -  | 0           | 0%   | 0%   | 0    | 0             | 0%   | 0%          |      |     |
| 2               |        | 5 01 01 2.07 06 | Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya  | Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | 20  | 100.000.000   | 120  | 165.654.807   | 120  | 165.654.807 | 120   | 165.654.807 |      |  | 14   | 417.940.000 | 14   | 417.940.000 | 100% | 95%  | 134  | 583.594.807   | 670% | 584%        |      |     |
| 6               |        | 5 01 01 2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah  | Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia   | 5   | 395.000.000   | 5    | 2.390.450   | 5    | 2.390.450   | 5   | 2.390.450   | 4    | 36.688.625   |      | 25.798.684  | 5  | 110.496.133 | 100% | 53%  | 5    | 112.886.583   | 100% | 29%         |      |     |
| 1               |        | 5 01 01 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 200   | 5.000.000     | 100  | 150.829.357   | 100  | 150.829.357 | 100   | 148.000     | 50   | 519.000  | 25   | 2.938.100   | 100  | 3.605.100   | 100% | 144%   | 200  | 154.434.457   | 100% | 3089%       |      |     |
| 2               |        | 5 01 01 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 24  | 360.000.000   | 12   | 175.800.000   | 12   | 48.823.625  | 12  | 45.636.824  | 3    | 24.904.684   | 3    | 65.048.885  | 12   | 171.979.018 | 100% | 98%  | 24   | 220.802.643   | 100% | 61%         |      |     |
| 3               |        | 5 01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 24  | 30.000.000    | 12   | 874.942.068   | 12   | 874.942.068 | 12  | 2.224.000   | 4    | 375.000  | 2    | 6.918.000   | 12   | 9.817.000   | 100% | 33%  | 24   | 884.759.068   | 100% | 2949%       |      |     |
| 7               |        | 5 01 01 2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah  | Jumlah Jenis barang milik daerah SKPD yang dipelihara.   | 48  | 1.075.000.000 | 48   | 639.725.450   | 48   | 335.654.082 | 48  | 639.725.450 | 7    | 35.443.788   | 16   | 64.410.194  | 10   | 393.136.870 | 49   | 595.143.060  | 102% | 93%           | 97   | 827.797.142 | 202% | 77% |
| 1               |        | 5 01 01 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 23  | 420.000.000   | 23   | 281.132.500   | 23   | 77.299.789  | 23  | 12.512.804  | 6    | 54.713.417   | 6    | 28.094.536  | 5  | 125.802.455 | 23   | 221.123.212  | 100% | 79%           | 46   | 298.423.001 | 200% | 71% |
| 2               |        | 5 01 01 2.09 06 | Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya   | Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 25  | 155.000.000   | 25   | 112.198.000   | 25   | 577.201.001 | 25  | 9.004.870   | 10   | 13.911.065   | 5    | 39.917.150  | 25   | 62.833.085  | 100% | 56%  | 50   | 640.034.086   | 200% | 413%        |      |     |
| 3               |        | 5 01 01 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1   | 500.000.000   | 1    | 246.394.950   | 1    | 404.552.174 | 1   | 22.930.984  | 1    | 22.404.593   |      | 227.417.265 | 1  | 311.186.763 | 100% | 126%   | 1    | 715.738.937   | 100% | 143%        |      |     |
| 5 01 02         |        |                 | PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  | % Kesesuaian untaian kegiatan pembangunan dalam RKPD terhadap prioritas tahunan daerah                 | 100   | 1.825.308.700 | 100  | 764.403.050   | 100  | 37.036.750  | 100   | 131.343.799 | 97,3 | 153.885.656  |      | 492.364.415 | 97   | 896.839.474 | 97%  | 117%   | 197  | 933.876.124   | 197% | 51%         |      |     |
|                 |        |                 |   | % data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas   | 95  | 1.190.000.000 | 95   | 257.984.544   | 95   | 257.984.544 | 95  | 13.466.500  | 100  | -  |      | 36.008.000  | 100  | 49.474.500  | 105% | 25%  | 195  | 307.379.044   | 205% | 26%         |      |     |
|                 |        |                 |   | % hasil rekomendasi pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti                                     | 100   | 775.000.000   | 100  | 381.621.190   | 85   | 360.000.000 | 100   | 3.868.886   | 100  | 13.161.386   | 92,3 | 37.712.915  | 92   | 65.974.516  | 100% | 18%  | 192  | 447.545.706   | 192% | 58%         |      |     |
| 5 01 02 2.01    |        |                 | Penyusunan Perencanaan dan  | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai standar                                     | 6   | 1.825.308.700 | 4    | 381.621.190   | 2    | 764.403.050 | 2   | 115.376.638 | 1    | 140.724.250  | 1,00 | 418.643.500 | 4  | 781.440.358 | 200% | 102%   | 8    | 1.163.061.548 | 133% | 64%         |      |     |
| 5 01 02 2.01 07 |        |                 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Pembangunan Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Disiapkan                            | 6   | 1.825.308.700 | 4    | 764.403.050   | 4    | 37.036.750  | 4   | 115.376.638 | 1    | 140.724.250  | 1    | 418.643.500 | 4  | 781.440.358 | 100% | 102%   | 8    | 818.477.108   | 133% | 45%         |      |     |
| 5 01 02 2.02    |        |                 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah   | Jumlah Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun                                  | 5   | 760.000.000   | 3    | 37.036.750  | 3    | 37.036.750  | 3   | 13.466.500  | -    | -  |      | 36.008.000  | 2  | 49.474.500  | 100% | 25%  | 5    | 86.511.250    | 100% | 11%         |      |     |
| 5 01 02 2.02 01 |        |                 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah  | Jumlah Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah   | 4   | 760.000.000   | 2    | 200.000.000   | 2    | 257.904.544 | 2   | 13.466.500  | -    | -  |      | 36.008.000  | 1  | 49.474.500  | 50%  | 25%  | 3    | 307.379.044   | 75%  | 40%         |      |     |





| NO | Saaran | Nomor           | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan  | Indikator Kinerja Program/Kegiatan  | Target RPJMD pada Tahun 2018 s.d Tahun 2023 |         | Realisasi Kinerja Renstra RPJMD s.d RKPD Tahun Lalu |               | Target Kinerja Anggaran RKPD Tahun Berjalan |    | Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2023 |      | Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2023 |    | Tingkat Capaian Kinerja Anggaran RKPD Tahun 2023 |       | Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d Tahun 2023 |    |   |    |
|----|--------|-----------------|--|---|---|---------|---|---------------|---|----|--|------|---|----|--|-------|---|----|---|----|
|    |        |                 |  |   | K   | Rp      | K   | Rp            | K   | Rp | K  | Rp   | K   | Rp | K  | Rp    | K   | Rp | K | Rp |
|    |        |                 |  |   |   |         |   |               |   |    |  |      |   |    |  |       |   |    |   |    |
| 2  |        | 5 05 02 2.02 05 | Penelitian dan Pengembangan Parwisata  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Parwisata  | 2   | Dok     | 1.000.000.000                                       | 1             | 500.000.000                                 | 1  | 410.000  | 100% | 23%   | 1  | 116.791.740                                      | 50%   | 12%   |    |   |    |
| 3  |        | 5 05 02 2.02 10 | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat   | 4   | Dok     | 1.650.000.000                                       | 2             | 250.000.000                                 |    |  | 0%   | 0%  | 0  | 0  | 0%    | 0%  |    |   |    |
| 2  |        | 5 05 02 2.03    | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan  | 14  | Dok     | 3.900.000.000                                       | 4             | 1.290.972.750                               |    |  |      | 0%  | 0  | 1.487.146.150                                    | 0%    | 38%   |    |   |    |
| 1  |        | 5 05 02 2.03 02 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan  | 2   | Dok     | 750.000.000   | 1             | 447.945.000                                 |    |  |      | 100%  | 1  | 1.394.584.000                                    | 50%   | 186%  |    |   |    |
| 2  |        | 5 05 02 2.03 07 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup   | 6   | Dok     | 2.250.000.000                                       | 1             | 743.027.750                                 |    |  |      | 100%  | 1  | 299.339.770                                      | 17%   | 13%   |    |   |    |
| 3  |        | 5 05 02 2.03 08 | Penelitian dan Pengembangan Kehutanan  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan  | 4   | Dok     | 900.000.000   | 2             | 100.000.000                                 |    |  |      | 100%  | 2  | 162.999.250                                      | 50%   | 18%   |    |   |    |
|    |        | 5 05 02 2.03 09 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum   | 2   | Dok     | 2.600.000.000                                       | 1             | 510.000.000                                 |    |  |      | 0%  | 0  | 161.292.500                                      | 0%    |   |    |   |    |
|    |        | 5 05 02 2.03 04 | Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Perkebunan dan Pangan   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Perkebunan dan Pangan   | 1   | Dok     | 250.000.000   | 1             | 250.000.000                                 |    |  |      | 100%  | 1  | 7.554.000  |       |   |    |   |    |
| 4  |        | 5 05 02 2.04    | Pengembangan Inovasi dan Teknologi   | Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dilaksanakan   | 10  | Inovasi | 1.035.000.000                                       | 5             | 550.000.000                                 |    |  |      | 420%  | 21 | 278.152.583                                      | 210%  | 27%   |    |   |    |
|    |        | 5 05 02 2.04 01 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi   | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi   | 2   | Dok     | 460.000.000   | 1             | 250.000.000                                 |    |  |      | 100%  | 1  | 113.475.632                                      | 50%   | 25%   |    |   |    |
|    |        | 5 05 02 2.04 02 | Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi | 6   | Lap     | 150.000.000   | 1             | 75.000.000                                  |    |  |      | 0%  | 0  | 3.719.467  | 0%    | 2%  |    |   |    |
| 3  |        | 5 05 02 2.04 04 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berbasis Inovatif                   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berbasis Inovatif                   | 2   | Lap     | 125.000.000   | 1             | 75.000.000                                  |    |  |      | 47%   | 1  | 60.340.394                                       | 50%   | 48%   |    |   |    |
| 4  |        | 5 05 02 2.04 04 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Kelembagaan                                 | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelembagaan   | 5   | Lap     | 200.000.000   | 4             | 100.000.000                                 |    |  |      | 25%   | 1  | 48.738.550                                       | 20%   | 24%   |    |   |    |
| 5  |        | 5 05 02 2.04 05 | Penelitian dan Pengembangan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual   | 11  | Lap     | 100.000.000   | 10            | 50.000.000                                  |    |  |      | 100%  | 1  | 56.877.426                                       | 9%    | 57%   |    |   |    |
|    |        |                 |  |   |   |         | 46.841.272.700                                      |               | 15.224.600.299                              |    |  |      | 101,8%  |    | 13.460.252.801                                   | 81%   | 47%   |    |   |    |
|    |        |                 |  |   |   |         |   | 716.129.429   | 15.224.600.299                              |    |  |      | 101,8%  |    | 13.460.252.801                                   | 81%   | 47%   |    |   |    |
|    |        |                 |  |   |   |         |   | 2.929.164.187 | 1.297.603.568                               |    |  |      | 49,5%   |    | 34.233   | 49,5% |   |    |   |    |
|    |        |                 |  |   |   |         |   |               |   |    |  |      |   |    |  |       |   |    |   |    |

Catatan

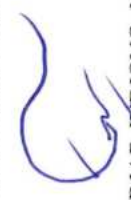
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Seluruh aparatour perencanaan mampu menyelesaikan target kinerja sesuai dengan jadwal walaupun belum dilaksanakan secara optimal

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Mengintensifkan koordinasi dan penyesuaian rencana penyerapan anggaran

Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penganggaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam RKPD Tahun Berikutnya : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penganggaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Nganjuk, Januari 2024  
 KEPALA BAPPEDA  
 KABUPATEN NGANJUK



Ir. FADJAR RUDIONO, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19640311 199303 1 012



FORM KONSISTENSI PROGRAM/KEGIATAN DOKUMENTASI PERENCANAAN S/D SEMESTER II TAHUN 2023

| NO | KABUPATEN/KOTA    | JUMLAH<br>OPD | RPJMD          |                 | RKPD           |                     | APBD           |                     |      |
|----|-------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------|
|    |                   |               | Jumlah Program | Jumlah Kegiatan | Jumlah Program | Jumlah Sub Kegiatan | Jumlah Program | Jumlah Sub Kegiatan |      |
|    | Kabupaten Nganjuk | 50            | 296            | 283             | 751            | 2091                | 160            | 430                 | 2082 |

| No | SASARAN   | No | INDIKATOR KINERJA  | Target  | Realisasi       | Capaian | OPD                                |
|----|---|----|--|---|-----------------|---------|------------------------------------|
| 1  | Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tenram, tertib, dan religius                            | 1  | Persentase Penanganan atas pelanggaran perda dan perkara   | 100%  | 100%            | 100%    | Satpol PP                          |
|    |   | 2  | Persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat                           | 100%  | 96%             | 96%     | Satpol PP                          |
|    |   | 3  | Persentase Antisipasi Penanganan Konflik Sosial dan Kehidupan Beragama   | 90%   | 100%            | 111%    | Bakesbangpol                       |
| 2  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.  | 1  | Opini BPK terhadap LKPD dengan target capaian tahun 2023 berupa predikat WTP   | WTP   | WTP             | 100%    | BPKAD                              |
|    |   | 2  | Rasio kemandirian keuangan daerah  | 18.5  | 15.21           | 82.21%  | BAPENDA                            |
|    |   | 3  | Maturitas SPIP   | Level 3   | Level 3 (3,169) | 100%    | Inspektorat                        |
|    |   | 4  | Predikat SAKIP   | 80,01 (A)   | 67,45 (B)       | 84.30%  | Sekda                              |
|    |   | 5  | Nilai EKPPD  | sangat tinggi   | 3,1017 (sedang) | 96%     | Sekda                              |
|    |   | 6  | Indeks SPBE  | 3.5   | 3.62            | 103%    | Kominfo                            |
|    |   | 7  | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku   | 67%   | 67.30%          | 100.45% | Arpus                              |
|    |   | 8  | Persentase OPD yang mendapatkan nilai pengawasan kearsipan internal  | 67%   | 67.30%          | 100.45% | Arpus                              |
|    |   | 9  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah  | 81.80   | 85.22           | 104.18% | Sekda                              |
|    |   | 10 | Persentase Indikator Kinerja Sasaran RPJMD yang mencapai target  | 100%  | 88,88%          | 88,88%  | Bappeda                            |
|    |   | 11 | Persentase Pemanfaatan hasil kelitbangan   | 100%  | 100%            | 100%    | Bappeda                            |
| 3  | Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah  | 1  | Indeks Profesionalitas ASN   | 71.5  | 70.23           | 98.22%  | BKPSDM                             |
| 4  | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.  | 1  | Tingkat Kemiskinan   | 11,75   | 10,70*          | 109,81% | Dinsos                             |
|    |   | 2  | Persentase penurunan PMKS  | Diturunkan ke level Renstra   |                 |         |                                    |
| 5  | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan prestasi pemuda                          | 1  | Indeks Pendidikan  | 0.61  | 0.63            | 103.28% | Disdik                             |
|    |   | 2  | Pemuda yang Berprestasi  | 100%  | 100%            | 100%    | Porabudpar                         |
|    |   | 3  | Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan   | 10%   | 10.23%          | 102.30% | Arpus                              |
| 6  | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat serta pengendalian penduduk                           | 1  | Indeks Kesehatan   | 0.72  | 0.80            | 111.11% | Dinkes                             |
|    |   | 2  | Laju Pertumbuhan Penduduk  | 0.37  | 0.69            | 53.62%  | PPKB                               |
| 7  | Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. | 1  | Indeks Pembangunan Gender  | 93,56   | 93,89*          | 100,35% | Dinsos                             |
|    |   | 2  | Indeks Pemberdayaan Gender   | 72  | 70,87*          | 98,43%  | Dinsos                             |
| 8  | Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan perikanan, serta kesejahteraan petani;    | 1  | Persentase pertumbuhan PDRB kategori pertanian dan perikanan;  | 3.73  | 3.19            | 85,52%  | Dinas Pertanian<br>Dinas Ketahanan |
|    |   | 2  | Nilai Tukar Petani (NTP).  | 107.5   | 116.05          | 107,9%  | Dinas Pertanian                    |
| 9  | Meningkatnya volume usaha kategori industri dan perdagangan ;                                   | 1  | Persentase pertumbuhan PDRB kategori industri;   | 10.69   | 4.56            | 42.60%  | Disperindag                        |
|    |   | 2  | Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan.  | 10.01   | 2.04            | 20.30%  | Disperindag                        |
| 10 | Meningkatnya perluasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat ;                                     | 1  | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);  | 4.65  | 4.68            | 100,6%  | Disnaker                           |
| 11 | Meningkatnya iklim investasi yang kondusif  | 1  | Nilai Investasi Daerah.  | 3,450.00  | 2,413.50        | 69.96   | DPMPSTP                            |
| 12 | Meningkatnya kemandirian Desa dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan                                | 1  | Indeks Desa Membangun  | 0.7695  | 0.7591          | 98.64%  | PMD                                |
| 13 | Meningkatnya daya saing pariwisata daerah;  | 1  | Persentase peningkatan kunjungan wisatawan.  | 5   | 41.56           | 831.20  | Parporabud                         |
| 14 | Meningkatnya pelestarian kebudayaan, kesenian, dan tradisi lokal Daerah.                        | 1  | Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan;   | 31.15   | 32.79           | 105.26  | Parporabud                         |
|    |   | 2  | Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan   | 35.14   | 36.22           | 103.07  | Parporabud                         |
| 15 | Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum, perumahan rakyat dan perhubungan yang handal;        | 1  | Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Fungsional;  | 95  | 95.00000867     | 100.00  | PUPR                               |
|    |   | 2  | Indeks Kinerja Sistem Irigasi;   | 73.11   | 75.31937663     | 103.02  | PUPR                               |
|    |   | 3  | Persentase jembatan di jalan kabupaten dalam kondisi baik;   | 94.98   | 95.0075643      | 100.03  | PUPR                               |
|    |   | 4  | Persentase bangunan pelayanan publik yang berfungsi baik;  | 93.25   | 92.85714286     | 99.58   | PUPR                               |
|    |   | 5  | Persentase Penduduk perkotaan dan pedesaan mendapatkan pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan dan non perpipaan; | 97.1  | 99.33627744     | 102.30  | Perkim & PUPR                      |
|    |   | 6  | Persentase sistem air limbah skala Rumah tangga/komunitas/kawasan/kota;  | 64.6  | 98.80594396     | 152.95  | Perkim & PUPR                      |
|    |   | 7  | Persentase Pemenuhan drainase lingkungan;  | 92.51   | 92.50997956     | 99.9%   | Perkim & PUPR                      |
|    |   | 8  | Persentase Pemenuhan kebutuhan jalan lingkungan;   | Masuk dalam Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Fungsional; |                 |         |                                    |
|    |   | 9  | Persentase ketersediaan Rumah Layak Huni;  | 93.21   | 85.91           | 92.17   | Perkim                             |
|    |   | 10 | Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas.   | 1500%   | 1386.27%        | 92.42   | Dishub                             |
| 16 | Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang daerah;   | 1  | Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang  | 81.83   | 82.10354321     | 100.33  | PUPR                               |
| 17 | Meningkatnya kualitas lingkungan dan konservasi sumber daya alam                                | 1  | Indeks Kualitas Air  | Diturunkan ke level Renstra   |                 |         |                                    |
|    |   | 2  | Indeks Kualitas Udara  | Diturunkan ke level Renstra   |                 |         | LH                                 |
|    |   | 3  | Indeks Kualitas Tutupan Lahan  | Diturunkan ke level Renstra   |                 |         | LH                                 |
|    |   | 4  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup   | 65.05   | 68.38           | 105.12  | LH                                 |
|    |   | 5  | Persentase cakupan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga                               | 27  | 26.1            | 96.67   | LH                                 |
|    |   | 6  | Persentase Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui 3R                           | 72  | 67.26           | 93.42   | LH                                 |
|    |   | 7  | Persentase peningkatan ruang terbuka hijau perkotaan   | 60  | 52.47           | 87.45   | LH                                 |
| 18 | Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana   | 1  | Indeks Resiko Bencana (IRB)  | 65.47   | 91.75           | 59.86   | BPBD                               |

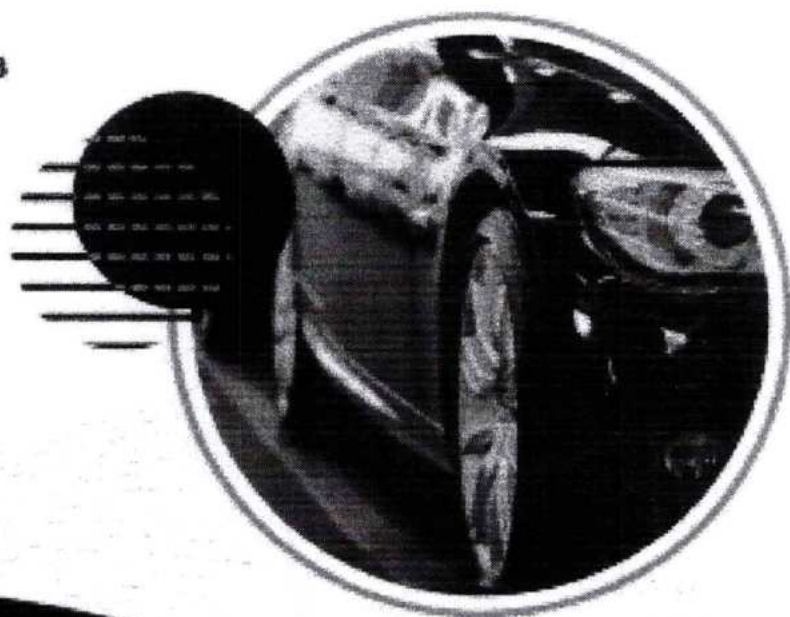


# **POLICY BRIEF**

## **KAJIAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERAPAN SEWA KENDARAAN DINAS DI KABUPATEN NGANJUK**

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Jl. Basuki Rahmad No.1  
Telp. No. (0358) 321233**



**POLICY BRIEF  
PENGEMBANGAN  
PARIWISATA  
BENDUNGAN  
SEMANTOK  
2023**

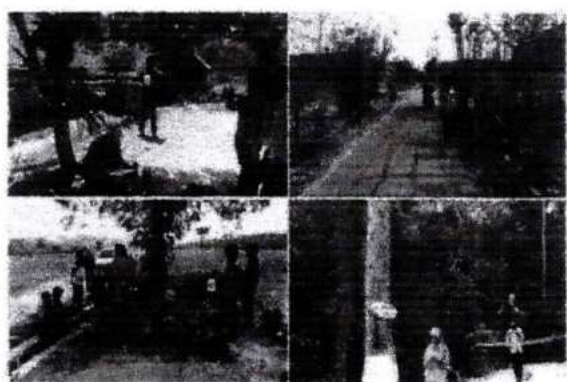


**BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAN  
KABUPATEN**



# **POLICY BRIEF**

## **PENANGANAN KEKERINGAN WILAYAH NGANJUK UTARA**



**BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK**

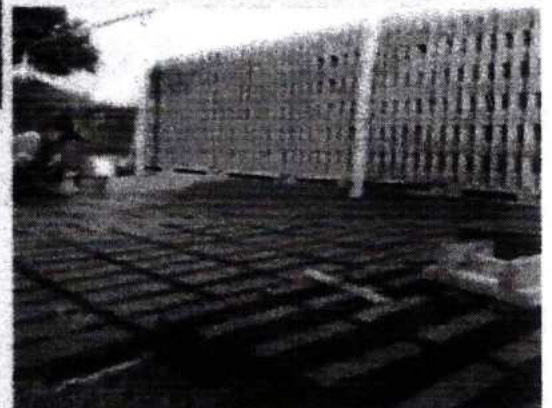
**2023**





# **POLICY BRIEF**

## **PENGEMBANGAN INDUSTRI GENTING DAN BATU BATA DI KECAMATAN NGRONGGOT**

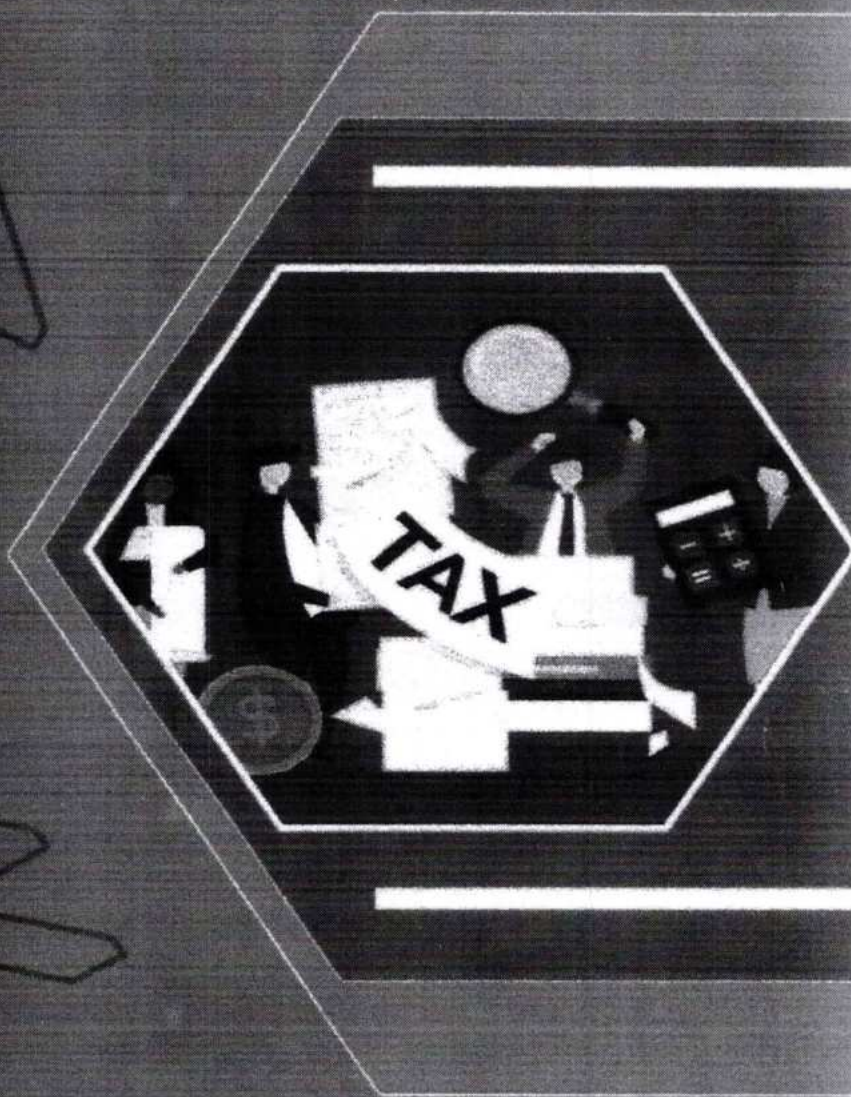


**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2023**



# **POLICY BRIEF**

## **OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH**



**BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2023**



# **POLICY BRIEF**

**OPTIMALISASI PROMOSI  
POTENSI KABUPATEN NGANJUK  
MELALUI PENDEKATAN CITY BRANDING**

**2023**

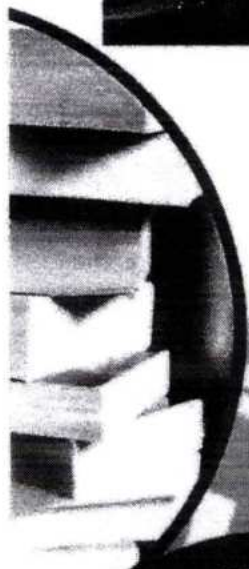


**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN NGANJUK**



# **POLICY BRIEF**

## **KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023**



**BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK**